

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA
MODAL EKUITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2019 – 2022)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ATIKA SARI DALIMUNTHE

NIM. 12030119120035

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Atika Sari Dalimunthe
Nomor Induk Mahasiswa : 12030119120035
Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis/S1 Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA MODAL EKUITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Daljono, M.Si., Akt.

Semarang, 6 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Daljono M.Si., Akt.

NIP. 196409151993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Atika Sari Dalimunthe
Nomor Induk Mahasiswa : 12030119120035
Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis/S1 Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA MODAL EKUITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

Telah dipertahankan di depan Dosen Penguji pada tanggal 20 November 2023 dan telah dinyatakan LULUS

Ketua Tim Penguji : Dr. Drs. Daljono M.Si., Akt.

Anggota : 1. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.
2. Adi Firman Ramadhan, S.E., M.Ak.

Semarang, 20 November 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D
NIP. 197307222002121002

Ketua Tim Penguji



Dr. Drs. Daljono, M.Si., Akt.
NIP. 196409151993031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Atika Sari Dalimunthe menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA MODAL EKUITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Atika Sari Dalimunthe

NIM. 12030119120035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

– QS Al-Baqarah: 286

“Be positive and you’ll see the positive coming”

– Bang Chan from Stray Kids

“I’m proud of me because I’ve survived the days I thought I couldn’t”



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Almarhum ayah, ibu yang saya sayangi, keempat saudara terkasih, akuntansi,
serta orang-orang tersayang yang senantiasa mendukung saya.*

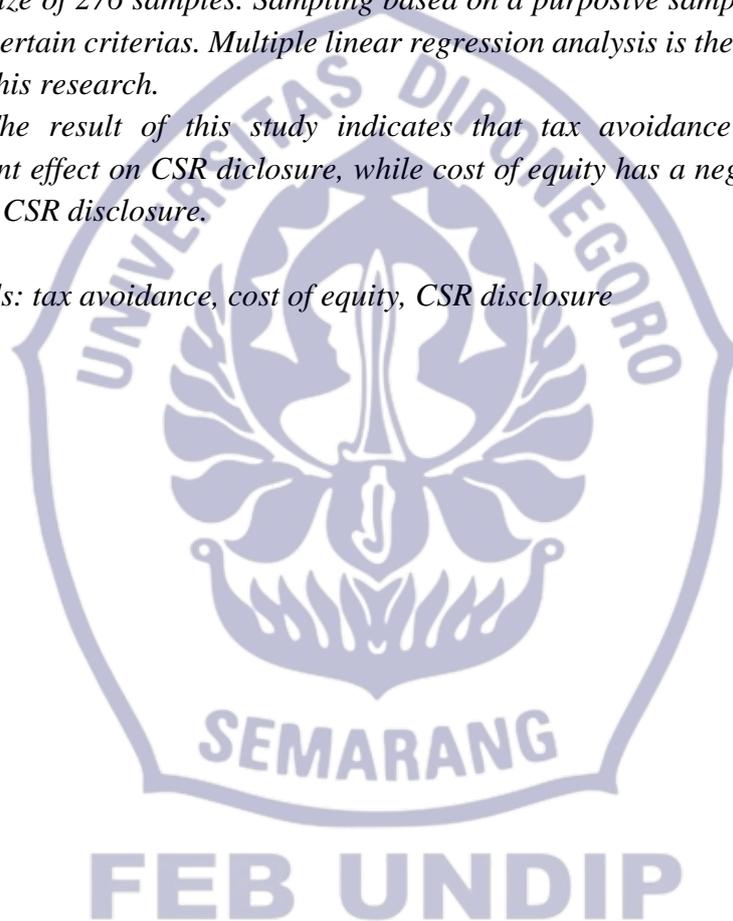
ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of tax avoidance and cost of equity on CSR disclosure. There are two independent variables in the examination, such as tax avoidance and cost of equity, also the dependent variable is CSR disclosure.

This research used manufacturing companies during 2019-2022 with a total sample size of 276 samples. Sampling based on a purposive sampling method that follows certain criteria. Multiple linear regression analysis is the analysis method used in this research.

The result of this study indicates that tax avoidance has a positive significant effect on CSR disclosure, while cost of equity has a negative significant effect on CSR disclosure.

Keywords: tax avoidance, cost of equity, CSR disclosure



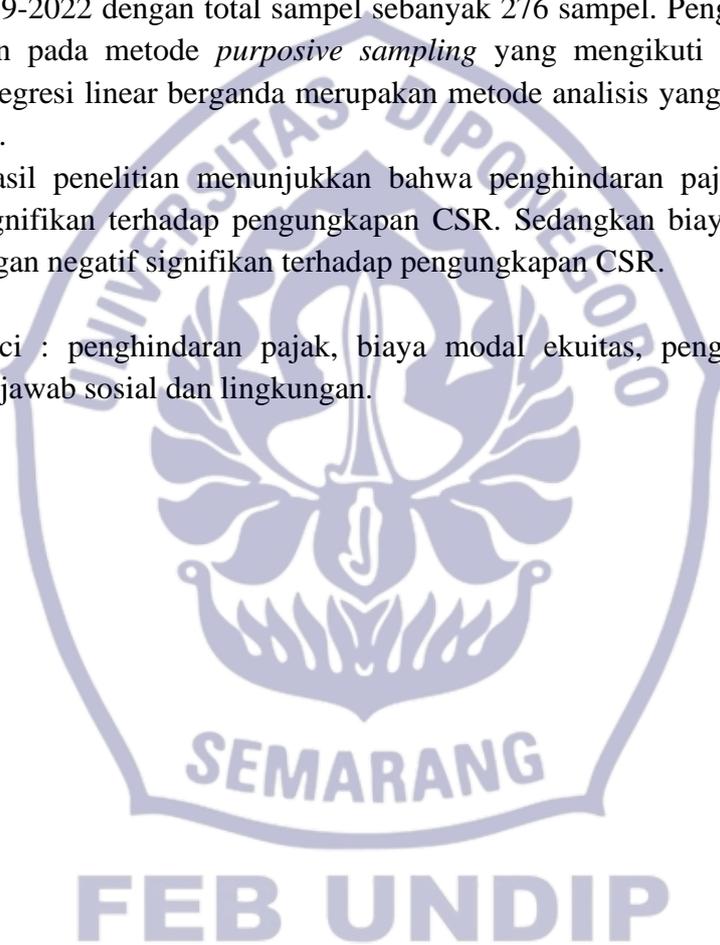
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Variabel yang digunakan di dalam pengujian adalah penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas sebagai variabel independen, dan CSR sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 dengan total sampel sebanyak 276 sampel. Pengambilan sampel didasarkan pada metode *purposive sampling* yang mengikuti kriteria tertentu. Analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berhubungan positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan biaya modal ekuitas berhubungan negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata kunci : penghindaran pajak, biaya modal ekuitas, pengungkapan CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA MODAL EKUITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”. Penulisan skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Fuad S.ET., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
3. Bapak Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan dan nasehat selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Drs. Daljono, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan, dan nasehat selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan dan saran.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Rifai Dalimunthe dan Ibu Roslinda Nasution yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak saya, Nur Syofa Lira Dalimunthe dan ketiga adik saya, Mutiara Tsari T. Dalimunthe, Biyan Rafli Dalimunthe, dan Ichsan Habibie Dalimunthe yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
9. Safira, Kiki, Deva, Bella, dan Aulia atas persahabatan dan perjalanan selama kehidupan perkuliahan sejak awal yang banyak membantu penulis dalam kesulitan dan bersedia menjadi tempat segala cerita selama penulisan skripsi ini.
10. Kedua sahabat saya selama SMP (Ela dan Nurul) yang senantiasa memberikan semangat dan mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman SMA (Dila, Pia, Dhea, Yosi dan Novi) yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman satu Tim KKN Desa Ketanggungan, Desra, Farah, Fitri, Sania, Alwi dan Hilmy telah memberikan bantuan dan semangat selama masa KKN hingga saat ini.
13. Teman-teman seperbimbingan, Sasmita, Erma, Ayu, Triyana, Zadha, Alam, Yusuf dan Dhanka yang menemani melewati banyak proses dalam skripsi dan saling memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Teman-teman Akuntansi Universitas Diponegoro 2019, atas bantuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
15. Member Stray Kids, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, dan I.N yang secara tidak langsung telah memberikan penulis semangat selama proses penulisan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca dan setiap pihak yang menggunakannya.

Semarang, 6 Oktober 2023



Atika Sari Dalimunthe

NIM. 12030119120035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Manfaat Penelitian	16
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Legitimasi	20
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	21
2.1.3 <i>CSR Disclosure</i>	25
2.1.4 Penghindaran Pajak	27
2.1.5 Biaya Modal Ekuitas	29
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Pengembangan Hipotesis	35
2.4.1 Penghindaran Pajak dan Pengungkapan CSR	35

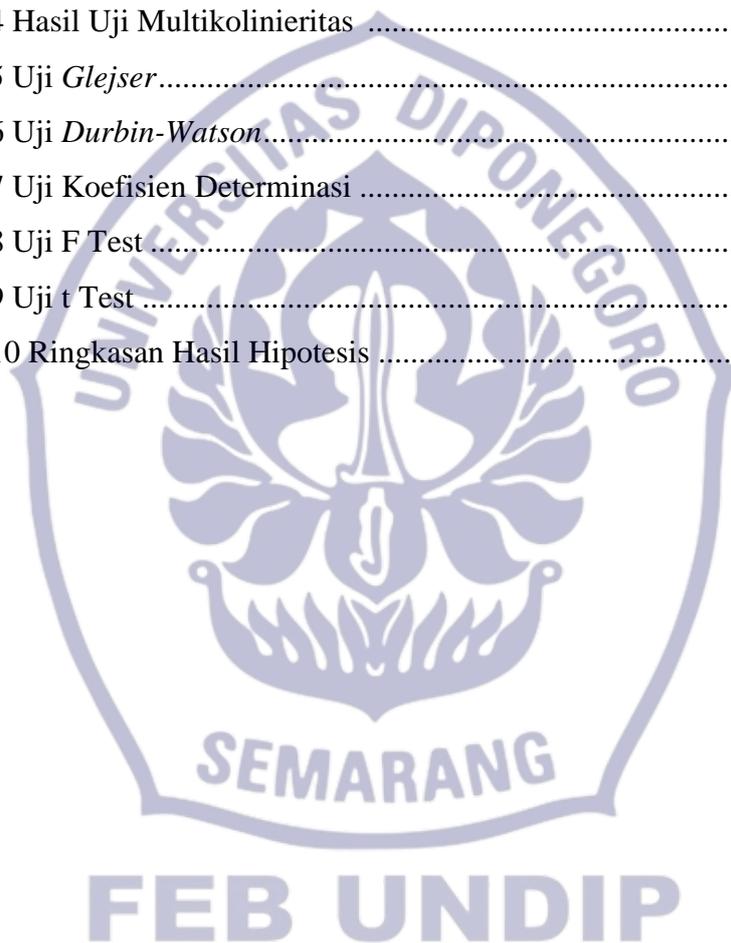
2.4.2	Biaya Modal Ekuitas dan Pengungkapan CSR	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Variabel dan Definisi Operasional	38
3.1.1	Variabel Dependen	38
3.1.2	Variabel Independen	40
3.1.2.1	Penghindaran Pajak	41
3.1.2.2	Biaya Modal Ekuitas	41
3.2	Populasi dan Sampel	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.4	Metode Pengumpulan Data	43
3.5	Metode Analisis	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	44
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1	Uji Normalitas	44
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas	45
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	45
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas	46
3.5.3	Pengujian Hipotesis	46
3.5.3.1	Analisis Regresi Berganda	47
3.5.3.2	Koefisien Determinasi	47
3.5.3.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	48
3.5.3.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	48
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2	Analisis Data	50
4.2.1	Statistik Deskriptif	51
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	52
4.2.2.1	Uji Normalitas	52
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas	53
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	53
4.2.2.4	Uji Autokorelasi	54

4.2.3 Uji Hipotesis	55
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi	55
4.2.3.2 Uji F-test	56
4.2.3.3 Uji T-test	56
4.3 Interpretasi Hasil	57
4.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Pengungkapan CSR	58
4.3.2 Pengaruh Biaya Modal Ekuitas terhadap Pengungkapan CSR	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	53
Tabel 4.5 Uji <i>Glejser</i>	54
Tabel 4.6 Uji <i>Durbin-Watson</i>	55
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.8 Uji F Test	56
Tabel 4.9 Uji t Test	56
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Hipotesis	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i>	54



DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Perusahaan Sampel	61
B. Tabulasi Data	63
C. Indeks Standar GRI	70
D. Skor CSRD	75
E. Lampiran Statistik Deskriptif	79
F. Uji Asumsi Klasik	79
G. Hasil Analisis Linear Berganda	81



BAB I

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan tersusun atas beberapa bagian, antara lain latar belakang, rumusan masalah yang menjadi arah riset, arah dan kegunaan riset, dengan struktur atau aturan penulisan yang berisi rincian singkat setiap bagian dalam skripsi ini.

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak dapat berdiri sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Salah satunya dengan membina hubungan yang baik dengan yang bersifat timbal-balik dengan para pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan tidak hanya terfokus dengan keuntungan, akan tetapi fokus juga kepada aspek non-finansial yang dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut sejalan dengan teori *Triple Bottom Line*, bahwa fokus perusahaan tidak hanya terbatas berdasarkan target ekonomi atau keuangan saja, namun juga mencakup perhatian terhadap lingkungan dan sosial (Salsabila, 2023). CSR bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab pada lingkungan, sosial dan tata kelola untuk memastikan kinerja berkelanjutan.

UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 menerangkan apabila perusahaan yang melakukan bisnis pada bidang yang berhubungan dengan SDA harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Jhonatan sofian (2007), konsep CSR memberi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari para karyawan, klien, masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Perusahaan tidak hanya berhadapan dengan suatu bentuk kewajiban untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga diwajibkan untuk selalu mengamati tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Apabila publik berpendapat bahwa suatu perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungannya dan tidak menjumpai adanya suatu andil bahkan merasakan adanya dampak negatif dari Bergeraknya entitas sehingga keadaan tersebut memicu suatu tentangan berupa perlawanan dari masyarakat atau biasa disebut dengan gejolak sosial. Janji setiap perusahaan untuk memberikan berbagai kontribusi sosial dan lingkungan dalam suatu proses pembangunan nasional itulah yang menjadi masalah utama dari konsep CSR.

Di Indonesia, masih terdapat kasus dimana perusahaan tidak memperhatikan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya walaupun sudah adanya dasar hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR, seperti yang terjadi pada PT Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran yang mengakibatkan munculnya semburan lumpur panas sejak 29 Mei 2006. Sebanyak 20 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara kerugian material ditaksir mencapai Rp 45

triliun lebih. Dampak kerugian menjadi begitu besar akibat semburan lumpur panas berpusat di Kecamatan Porong, yang merupakan permukiman padat penduduk serta salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Lapindo akhirnya sepakat membayar ganti rugi sebesar Rp 3,8 triliun. Namun faktanya, urusan ganti rugi tak kunjung tuntas sepenuhnya. Masih banyak korban yang menuntut pemerintah untuk ganti rugi melalui APBN. Di lain pihak, PT Lapindo tengah tersengal-sengal ditagih hutang oleh pemerintah atas ganti rugi. (Febrianto, 2019)

Terdapat juga kasus positif tentang CSR yang dilakukan di perusahaan Indonesia seperti PT Pertamina yang membentuk program “*towards a better life*” dengan tujuan program ini tidak hanya membangun relasi bisnis saja, tetapi meningkatkan pembangunan secara nasional. Program CSR lainnya adalah membangun agrowisata bernama *Campbell 2 Edupark* di Desa Tawang Sari (Salsabila, 2023). Program CSR lainnya dilakukan oleh PT HM Sampoerna yang bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Asdiraa menggelar program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Rumah Susun (Rusun) Pulogebang, Jakarta (Handoyo, 2018).

Isu tentang CSR semakin sering dibahas dalam beberapa dekade terakhir dan pengungkapan CSR tumbuh secara luas dalam bisnis Indonesia. Aniela (2012) menyatakan terkait semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, menyangkut penggundulan hutan, polusi air dan udara, hingga perubahan iklim. CSR sendiri timbul karena adanya dampak negatif dari berdirinya suatu perusahaan di suatu wilayah. Namun, tidak dipungkiri juga berdirinya suatu perusahaan maka akan menambah lapangan pekerjaan di wilayah

tersebut dan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar. Perusahaan akan berkembang dan berdampak dengan masyarakat apabila adanya hubungan timbal balik dari perusahaan dengan masyarakat. Respon positif diperlukan guna menjaga kelestarian perusahaan dan meningkatkan eksistensinya di kalangan pesaingnya.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan CSR di Indonesia ditandai melalui sudah banyaknya perusahaan di Indonesia yang telah mengimplementasikan program CSR. Hal ini terbukti dari dibentuknya forum CSR di berbagai daerah dan gencarnya publikasi terkait implementasi CSR di media cetak dan elektronik (amerta, 2018). Selain itu, adanya beberapa penyelenggaraan pada penghargaan perusahaan terbaik dalam melaksanakan CSR membuktikan semakin meningkatnya kualitas CSR di Indonesia. Misalnya pada penghargaan *TOP CSR Awards 2022* yang diikuti oleh 850 perusahaan di Indonesia, terdapat 200 perusahaan yang mengikuti penilaian dan 160 perusahaan yang berhasil mengikuti penilaian secara lengkap. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2021 dimana hanya 145 perusahaan yang berhasil mengikuti penilaian secara lengkap (Akhmad, 2022)

Akan tetapi, usaha dalam melakukan penerapan CSR di Indonesia sendiri mustahil tidak memiliki hambatan. Menurut Tanudjaja et al. (2006), dari kalangan ekonom sendiri beranggapan sesungguhnya tujuan utama setiap perusahaan pada dasarnya yaitu memberikan keuntungan yang maksimal bagi para *shareholders* dengan mempertaruhkan kepentingan lainnya. Selain itu tidak jarang yang memiliki asumsi bahwa satu-satunya argumen mengapa setiap entitas mau melakukan

berbagai kegiatan yang bertabiat sosial dengan alasan adanya keuntungan dibaliknya, yaitu meningkatkan reputasi suatu perusahaan di mata publik. Lanis & Richardson (2013) mengungkapkan betapa pentingnya bagi setiap perusahaan dalam melakukan sebuah kebijakan publik dalam rangka memperoleh suatu legitimasi masyarakat. Gray et al. (1995) memiliki asumsi bahwa setiap entitas lebih mementingkan untuk mendapatkan suatu legitimasi dalam mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 850 perusahaan yang mengikuti *TOP CSR Awards 2022*, hanya 200 perusahaan yang mengikuti penilaian dan 160 perusahaan yang berhasil mengikuti penilaian secara lengkap (Akhmad, 2022). Sehingga dapat dikatakan masih banyak perusahaan yang mengungkapkan CSR hanya sekedar pengungkapan karena merupakan kewajiban dan terdapat keuntungan dibalik pengungkapan tersebut, dalam hal ini yaitu nama baik perusahaan di mata publik.

Hambatan lainnya adalah masih banyaknya perusahaan yang cenderung enggan untuk menjalankan CSR, karena menganggap CSR masih merupakan pengungkapan sukarela atau ekstra yang tidak menguntungkan dalam jangka pendek. Di sisi lain, ada pula perusahaan yang masih kurang paham dalam menerapkan program CSR sehingga tidak melakukannya, biasanya hal ini terjadi pada perusahaan tradisional yang belum mampu menyesuaikan terhadap akuntabilitas lingkungan dan masyarakat.

UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012 mewajibkan seluruh perusahaan pada bidang yang berkaitan dengan SDA untuk menjalankan kewajibannya pada tanggung jawab lingkungan dan sosial. Namun, belum ada

ketentuan atau peraturan mengenai item apa saja yang harus diungkapkan dalam kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR ini menggerakkan beberapa peneliti untuk menguji faktor-faktor yang memotivasi setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Hal ini menjadi bahan yang penting untuk dikaji mengingat penerapan aturan di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal dalam penertiban pelaksanaan pengungkapan dan praktik CSR di perusahaan. Faktor tersebut bisa saja terjadi dikarenakan masalah penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas perusahaan. Penghindaran pajak akan menimbulkan reputasi buruk bagi masyarakat, untuk menutupi atau menghilangkan reputasi buruk tersebut, perusahaan berusaha untuk meningkatkan pengungkapan CSR nya. Berbeda dengan biaya modal ekuitas, perusahaan yang memiliki biaya modal ekuitas yang tinggi artinya memiliki risiko yang tinggi pula, untuk menurunkan risiko tersebut, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak CSR sehingga akan menurunkan risiko, dan *expected return* akan menjadi lebih murah pula.

Seperti yang diketahui bahwa pajak menjadi sumber penerimaan pendapatan paling besar di setiap negara. Berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2009, Pajak, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu dan organisasi, tidak menghasilkan hasil langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Pajak digunakan pemerintah untuk melakukan tanggung jawab negara dalam beraneka bidang untuk memperoleh kemakmuran publik. Perusahaan harus membayar pajak yang nominalnya di kalkulasikan dari *net income* yang di peroleh. Karena itulah, semakin banyak beban pajak yang suatu

perusahaan bayarkan, maka penerimaan negara akan semakin besar pula. Hal berbeda untuk suatu perusahaan, pajak menjadi salah satu beban yang akan meminimalisir *net income*. Sasaran pemerintah untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak kontradiktif dengan sasaran suatu perusahaan, yang mana akan berusaha memiliki beban pajak yang rendah sehingga dapat memperoleh *profit* yang lebih besar untuk memakmurkan pemilik dan meneruskan keberlangsungan operasional perusahaannya. Hal tersebut menjadi faktor pendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Apalagi Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, dimana perusahaan di berikan otoritas dan tanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri beban pajak yang wajib untuk dibayarkan, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk dapat menyusutkan beban pajaknya dalam batasan yang tidak melewati suatu ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.. Setiap perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak akan mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan dalam UU atau peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan yang digunakan pada kasus penghindaran pajak adalah *grey area*, yaitu celah peraturan yang ada di antara rancangan kalkulasi pajak yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Semakin banyak celah peraturan yang digunakan oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresif pajaknya .

Tindakan perusahaan dalam menghindari pajak akan mengurangi potensi penerimaan negara, yang sudah pasti akan merugikan negara. Menteri keuangan Sri Mulyani menyuarakan bahwa dampak dari *tax avoidance* mengakibatkan

penerimaan pajak negara di prediksi hilang dengan rentang Rp 3.360 triliun setiap tahunnya melalui *tunneling incentive* antar negara (Sukmana, 2020). Penghindaran pajak di Indonesia ada di urutan ke-4 se-Asia, setelah China, India dan Jepang, hal tersebut dimuat dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* (Sukmana, 2020). Tax Justice Network mengutarakan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 4,86 miliar USD jika di konversi ke rupiah sebesar Rp 68,7 triliun (kurs Rp14.149) akibat penghindaran pajak. Berdasarkan informasi yang beredar dan telah dipaparkan menyiratkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih sangatlah tinggi.

PT Bentoel International Investama Tbk menghindari pembayaran pajak melalui PT Bentoel sehingga merugikan negara Indonesia sebesar US\$ 14 juta. (nasional.kontan.co.id, 2019) Untuk melunasi pinjaman bank, membeli peralatan, dan membiayai kembali pinjaman bank, PT Bentoel memperoleh banyak pinjaman dari Rothmans Far East BV, sebuah perusahaan Belanda, antara tahun 2013 dan 2015. Namun, diketahui bahwa Rothmans Far East BV hanyalah sekedar sebuah perusahaan kertas—hanya mempekerjakan tiga orang di luar Belanda, dan pekerjaan lainnya dilakukan oleh pekerja dari perusahaan BAT lainnya. Berdasarkan perjanjian khusus dengan Belanda, total pemotongan pajak dikurangi dari 20% menjadi 0% di Indonesia. Diperkirakan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta setiap tahunnya akibat taktik penghindaran pajak ini. Masalahnya, Indonesia harusnya mampu menarik pajak sebesar dua puluh persen dari total pajak, atau tiga puluh juta dolar AS. PT Bentoel telah menyelesaikan pelunasan angsuran bunga utang pada tahun 2015 hingga 2017, meskipun

kemudian Indonesia dan Belanda mengubah perjanjian dengan Indonesia untuk mengizinkan penerapan tarif impor sebesar 5%. Namun peraturan ini baru berlaku pada bulan Oktober 2017. (nasional.kontan.co.id, 2019)

Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk juga diduga melakukan penggelapan pajak akibat keterlibatannya dalam transfer pricing pada tahun 2009 hingga 2017 melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International (Sugianto, 2019). PT Adaro diduga sengaja berencana hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta, kurang dari total pajak yang harus dibayar di Indonesia jika dikonversikan menjadi Rp. 1,75 triliun. Dalam hal ini, PT Adaro mengambil keuntungan dari peluang penghindaran pajak dengan menyediakan batu bara kepada Coaltrade Services International dengan harga diskon. Selanjutnya, batubara tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang sangat rendah, sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah bagi Indonesia (Sugianto, 2019).

Menurut beberapa fakta di atas, penghindaran pajak adalah masalah yang unik dan rumit. Di satu sisi, penghindaran pajak tidak melanggar aturan atau hukum, sementara di sisi lain, penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara.. Praktik penghindaran pajak ini kenyatannya merupakan kebingungan bagi pihak pemerintah, sebab wajib pajak mengurangi total pajak yang wajib untuk dibayar, akan tetapi pengurangan tersebut tidak bertolakbelakang dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, DJP tidak bisa bertindak apapun termasuk menuntut secara hukum, meskipun hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak.

Satiadji & Bambang (2010) memberikan pernyataan bahwa sampai saat ini sebagian perusahaan berprinsip telah memiliki dua beban yang memberatkan, yaitu pelaksanaan CSR dan kewajiban perpajakan. Demi meringankan beban tanggung jawab tersebut, kebanyakan perusahaan mulai meningkatkan agresivitas pajak melalui mekanisme penghindaran pajak. Menurut Ratmono & Sagala (2015), setiap perusahaan yang mempraktikkan beraneka ragam upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak bisa menimbulkan pandangan buruk kepada publik. Dipandang sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah apabila perusahaan menggunakan pajak agresif untuk kepentingan publik. Dunia usaha yang meminimalkan pajak tidak bertindak sejalan dengan nilai-nilai dan sudut pandang masyarakat, karena pajak memainkan peran penting dalam membiayai barang-barang publik termasuk infrastruktur, keamanan nasional, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Kegiatan CSR dilihat sebagai suatu kegiatan strategik bagi perusahaan untuk mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat, oleh karena itu perusahaan akan berusaha memperlihatkan kepada publik dengan cara mengungkapkannya pada *annual report* bahwa entitas telah banyak melangsungkan kegiatan CSR. Tindakan penghindaran pajak yang legal sekalipun dipandang tidak selaras dengan harapan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan cara lain melalui meningkatkan CSR-nya untuk merubah sudut pandang dan mendapatkan legitimasi di masyarakat. Apabila perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak, mereka dapat bertindak searah dengan teori legitimasi melalui mengungkapkan CSR tambahan secara bertahap (Lanis &

Richardson, 2013). Sehingga dapat disimpulkan praktik penghindaran pajak dapat memberikan suatu motivasi bagi sebuah perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak.

Hingga saat ini, penelitian yang berhubungan dengan aspek perpajakan dan CSR telah banyak dilakukan. Kebanyakan riset membahas tentang hubungan agresivitas pajak dengan CSR dan sebaliknya. Misalnya pada riset yang dilakukan oleh Arfiyanto & Didik Ardiyanto (2017) dan Rahmawati & Rohman (2019) yang meneliti hubungan antara agresivitas pajak dengan CSR *disclosure*. Hasil riset menampakkan agresivitas pajak mempunyai pengaruh positif pada CSR, yang sejalan dengan riset yang dilakukan Lanis & Richardson (2013), oleh sebab itulah perusahaan yang menghindari pajak akan cenderung mengungkapkan CSR secara berlebih.

Kao & Liao (2021) melakukan penelitian mendalam mengenai hubungan penghindaran pajak dengan tingkat pengungkapan pajak di dalam laporan CSR, menggunakan sampel perusahaan publik di U.K dari tahun fiskal 2010-2014. Hasil riset memperlihatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan pajak di dalam laporan CSR, yang mana hasil ini mendukung teori legitimasi dimana perusahaan tampaknya melegitimasi praktik penghindaran pajak dengan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait pajak pada laporan CSR.

Hasil penelitian yang bertolak belakang ditemukan pada riset yang dilakukan oleh Octaviana & Rohman (2014), penelitian tersebut mencoba mencari pengaruh yang dihasilkan dari kegiatan agresivitas pajak pada dorongan pelaksanaan CSR,

dengan memakai sampel perusahaan pertambangan dan properti yang terdaftar di BEI Tahun 2009-2013. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa agresivitas pajak mempunyai pengaruh negatif pada CSR bertentangan dengan riset sebelumnya yang diteliti oleh Lanis & Richardson (2013), sehingga dapat dikatakan perusahaan yang mempunyai agresivitas pajak yang rendah akan condong mengungkapkan CSR yang lebih luas untuk mencari perhatian publik dan taat dalam menjalankan aturan pemerintah.

Biaya modal adalah jumlah yang wajib perusahaan bayarkan atas modal yang mereka peroleh. Biaya modal ekuitas (*cost of equity*) adalah *return* yang wajib perusahaan bayarkan pada *shareholders* yang sudah menanam saham.. *Return* tersebut merupakan salah satu cara perusahaan untuk menstimulasi investor dalam melakukan investasi. Biaya modal ekuitas juga sering dipandang sebagai ekspektasi *shareholders* akan *return* dari modal yang sudah di tanamkan di perusahaan.

Pembiayaan modal ekuitas yang minimal menunjukkan perusahaan tersebut baik-baik saja, sehingga tingkat *return* yang di harapkan oleh *shareholders* juga akan rendah (Natalia dan Sun, 2013). Teori portofolio memperkirakan *shareholders* yang rasional akan menentang untuk menaikkan risiko investasi mereka tanpa diikuti dengan pengembalian yang meningkat. Apabila risiko suatu investasi tinggi, maka untuk menutup risiko tersebut *shareholder* mengharapkan *return* yang tinggi pula. Risiko dianggap sebagai dasar dalam menentukan untuk menerima ataupun menolak investasi sehingga dapat dikatakan biaya modal ekuitas dianggap menjadi faktor penentu yang signifikan untuk pemegang saham.

Oleh karena itu, organisasi diwajibkan menangani informasi yang dicantumkan dalam *annual report* menjadi lebih *accountable*, sehingga pemegang saham akan merasakan yakin dengan informasi tersebut dan tidak menuntut *return* yang lebih tinggi pada perusahaan.

Pemegang saham saat ini tidak hanya mempertimbangkan informasi *financial* tetapi juga *non-financial*, termasuk yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan. Pemegang saham mempertimbangkan masalah etika dan sosial dalam memilih portofolio investasi mereka seperti yang mereka yakini isu-isu sosial, lingkungan dan pemerintahan dapat mempengaruhi risiko investasi mereka (Reverte, 2011). Hal ini memotivasi para peneliti untuk meneliti faktor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat CSR. Salah satu faktornya diusulkan peneliti Dhaliwal et al. (2011) memeriksa pengaruh biaya modal ekuitas pada tahun sebelumnya pada tingkat pengungkapan CSR. Manajemen termotivasi oleh pengurangan risiko dan asimetri informasi yang kemudian mengurangi biaya modal ekuitas.

Penelitian Dhaliwal et al., (2011) menjabarkan bahwa *cost of equity* yang tinggi pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif dengan pengungkapan CSR pada tahun sekarang. Namun pengungkapan CSR ditemukan tidak berhubungan secara signifikan dengan perubahan biaya modal ekuitas suatu perusahaan di masa depan. Riset tersebut berbanding terbalik pada temuan Siregar et al. (2012) yang menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara biaya modal ekuitas tahun sebelumnya terhadap pengungkapan CSR di sektor Perbankan. Sementara itu, penelitian Hajawiyah et al. (2019) menunjukkan hasil yang sama

dengan Dhaliwal et al. (2011) dimana terdapat pengaruh positif diantara biaya modal tahun sebelumnya pada pengungkapan CSR. Namun, pengungkapan CSR ditemukan mempunyai pengaruh negatif signifikan pada perubahan biaya modal ekuitas.

Riset sebelumnya terkait biaya modal ekuitas dan pengungkapan CSR lebih banyak dilakukan di negara maju. Hal yang menarik untuk diteliti apakah investor memberikan penilaian yang sama atas pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia dengan kondisi pasar modal yang berkembang. Penelitian ini akan menguji apakah biaya modal ekuitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada tahun berjalan. Di sisi determinan, penelitian yang menguji pengaruh biaya modal ekuitas masih sedikit dilakukan. Penelitian ini akan menunjukkan refleksi yang lebih komprehensif terkait pengaruh biaya modal ekuitas terhadap pengungkapan CSR.

Perbedaan pada hasil penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak, biaya modal ekuitas dan CSR membuktikan bahwa topik ini masih layak untuk diteliti kembali. Riset tentang hubungan agresivitas pajak dan CSR telah banyak diteliti sebelumnya, tetapi periode penelitian 2019-2022 tergolong baru untuk penelitian ini. Populasi dan sampel yang digunakan pada riset ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dimana banyaknya kasus agresivitas pajak di perusahaan manufaktur dibanding perusahaan lain. Oleh karena itu riset ini ingin menguji benarkah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas yang bernilai tinggi akan mengungkapkan pengungkapan CSR lebih banyak.

Uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya menjadi landasan dilaksanakannya penelitian berjudul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Modal Ekuitas terhadap Pengungkapan CSR” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 – 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak dimaknai sebagai tindakan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal namun dianggap buruk oleh masyarakat dan pemerintahan. Setiap perusahaan yang diketahui melakukan penghindaran pajak biasanya lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di berbagai bidang sebagai upaya untuk mengalihkan dan menarik perhatian masyarakat.

Biaya modal ekuitas diartikan sebagai tingkat pengembalian yang suatu perusahaan bayarkan pada *shareholders* yang telah menanam saham. Salah satu faktor yang menarik investor untuk melakukan investasi perusahaan adalah return. Perusahaan yang menganggap biaya modal ekuitas sebagai beban, sudah pasti akan berusaha memiliki pembiayaan modal ekuitas yang rendah pula. Pembiayaan modal ekuitas yang rendah cenderung diminati oleh pemegang saham karena menunjukkan risiko yang rendah dan pengungkapan informasi yang luas oleh perusahaan. Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada riset ini yaitu:

1. Apakah perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak akan mengungkapkan informasi CSR yang lebih luas?
2. Apakah perusahaan yang memiliki biaya modal ekuitas yang tinggi akan mengungkapkan CSR yang lebih luas?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disusun, sehingga tujuan dari riset ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah Penghindaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah Biaya Modal Ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, terdapat manfaat yang diharapkan pada riset ini dapat berkontribusi pada pendidikan serta pihak yang terkait, diantaranya:

1. Hasil penelitian dapat menambah justifikasi empiris terkait pengaruh penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas terhadap pengungkapan CSR. Justifikasi ini dapat memperkuat teori legitimasi dan *stakeholder* dalam hubungan antara aspek perpajakan, biaya modal ekuitas dan CSR.

2. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menjelaskan fenomena atau teori serta permasalahan tentang CSR yang merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan di Indonesia, dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah informasi CSR yang diberikan oleh perusahaan digunakan untuk menutupi reputasi buruk perusahaan, dalam hal ini adalah masalah perpajakan perusahaan. Begitu juga untuk mengetahui apakah biaya modal ekuitas pada tahun sebelumnya akan membuat perusahaan meningkatkan luas pengungkapan CSR, serta apakah dengan pengungkapan CSR yang luas tersebut akan memperkecil biaya modal ekuitas pada tahun berikutnya.
3. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman perusahaan yang memiliki masalah perpajakan akan menutupinya dengan melakukan aktivitas CSR tambahan dari waktu ke waktu, dimana perusahaan akan semakin menjaga reputasinya semakin baik di mata masyarakat.
4. Bagi investor, penelitian ini bisa memberikan wawasan mengenai evaluasi investasi atau pengambilan keputusan. Riset ini juga diharapkan dapat memberikan referensi lebih pada bidang akuntansi mengenai pengaruh penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas pada *Corporate Social Responsibility* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk membagikan representasi rinci terkait penelitian yang dilaksanakan, maka dirangkai suatu penataan penyusunan yang memuat informasi terkait materi yang dibahas dalam setiap bab. Sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, cara perumusannya, arah dan manfaat penelitian, serta metode penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari riset sebelumnya, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesa. Ini juga mengupas teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian atau literatur yang akan digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metodologi penelitian membahas penggunaan metodologi. Ini mencakup deksripsi variabel operasional, sampel dan populasi pada penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik mengumpulkan data, dan langkah yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Di bagian hasil dan analisis terdiri atas pendeskripsian objek penelitian, teknik menganalisis data, uji hipotesis, dan pembahasan dari hasil pengujian dibahas.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup mengandung kesimpulan dari penelitian serta penjelasan tentang kendala dan rekomendasi yang dapat dikembangkan oleh peneliti berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisi tentang teori yang mendasari interaksi antara penghindaran pajak, biaya modal ekuitas dan pengungkapan CSR. Bab kedua ini juga memuat tentang riset terdahulu yang terpaut dengan riset ini, serta terdapat kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesa.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Menurut Gray et al. (1996), teori legitimasi dianggap sebagai *system* penyelenggaraan perusahaan yang arahnya pada sisi individu, pemerintah, dan kelompok masyarakat. Sehingga, tindakan dan aksi yang dilakukan perusahaan harus dapat diterima oleh kelompok tersebut. Teori legitimasi memaparkan pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi publik yang menyebabkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

Deegan et al. (2002) memberikan pernyataan bahwa legitimasi bisa didapatkan apabila ada kesesuaian antara eksistensi perusahaan yang sinkron dengan nilai dan norma yang ada pada publik dan lingkungan sekitar. Saat perusahaan bergerak ke arah ketidaksesuaian, maka pada waktu itu pula legitimasi perusahaan akan terancam. Perusahaan dengan legitimasi sosial yang terancam cenderung membuat pengungkapan yang mementingkan diri sendiri untuk melegitimasi perilaku mereka. Gray et al. (1987) memberikan definisi *CSR disclosure* sebagai pengungkapan yang memberikan informasi yang disusun untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial. Inisiatif CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai perusahaan selaras dengan struktur sosial masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan yang lebih agresif pajaknya pasti akan menyediakan lebih banyak pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sementara metode lain agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari pemerintah adalah membayar pajak sesuai aturan dan tidak mempraktikkan penghindaran pajak (Melinda & Syafruddin, 2021).

Dorongan suatu perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR-nya melalui biaya modal ekuitas yang tinggi. Karena biaya modal ekuitas yang tinggi, perusahaan terdorong untuk meningkatkan pengungkapan CSR dengan tujuan untuk menurunkan risiko, sehingga *expected return* yang diharapkan oleh pemegang saham juga rendah (Hajawiyah et al., 2019).

2.1.2 Corporate Social Responsibility

Kotler dan Nancy (2006) mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai komitmen organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang etis dan kontribusi sumber daya. Menurut definisi yang diberikan oleh The World Business Council for Sustainable Development, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didefinisikan sebagai komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk bertindak secara moral, mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup karyawan dan keluarganya. masyarakat setempat, dan masyarakat umum. Gagasan CSR

mengharuskan bisnis memiliki sudut pandang yang lebih luas, dimana mereka bertanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan, seperti pemasok, klien, karyawan, dan organisasi lain, selain pemegang saham..

Lanis & Richardson (2012) memberikan sudut pandangnya bahwa CSR diberikan makna sebagai salah satu kunci utama keberhasilan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Ketika menjalankan bsinisnya, perusahaan tidak hanya semata-mata menghasilkan *profit* saja tanpa mempedulikan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang aktif di masyarakat, sehingga keterikatan sosial dengan masyarakat sekeliling diharapkan menjadi lebih baik ditambah dengan adanya praktik CSR ini menjadi bagian hubungan langsung diantara perusahaan dan masyarakat.

Menurut Edi (2006), ada tiga tahap yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan CSR, yaitu:

1. *Corporate charity*, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui dorongan amal yang berdasarkan keagamaan dan kemanusiaan.
2. *Corporate philanthropy*, sebagai dorongan dengan sumber nilai dan etika universal agar peduli terhadap sesama dan mengupayakan keadilan sosial.
3. *Corporate citizenship*, sebagai stimulus kemasyarakatan untuk merealisasikan kesamarataan sosial berazaskan hakikat kontribusi sosial.

Awal mulanya kegiatan CSR direalisasikan dalam bentuk kariatif dan filantropi, tetapi karena adanya *pressure* yang kuat dari masyarakat, CSR menjelma seperti *social license to operation*. CSR mulai bergerak dari *philanthropy* menjadi

corporate citizenship sehingga memiliki makna lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat (Feronika et al., 2020).

Terdapat empat pola CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia (Edi, 2006) di antaranya:

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan dalam hal ini melakukan kegiatan CSR secara langsung dengan mendirikan kegiatan sosial atau memberikan secara serentak donasi public tanpa adanya perantara atau pihak lain yang terlibat.

2. Melewati yayasan

Suatu perusahaan mendirikan yayasan dengan perusahaan mempersiapkan dana rutin yang bisa dipakai yayasan untuk melaksanakan kegiatannya

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan melakukan CSR bekerjasama dengan badan sosial atau pun dalam memberikan dana atau melakukan kegiatan sosialnya.

4. Bergabung atau mendukung konsorsium

Perusahaan juga berpartisipasi, baik sebagai anggota maupun pendukung organisasi sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan membantu mencari rekan kerja dari dewan operasional dan memberikan tata olah sosial yang disetujui.

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan CSR untuk perusahaan, masyarakat, pemerintah maupun *stakeholders* (Wibisono, 2007). Bagi perusahaan, dengan adanya CSR, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta memperoleh pandangan yang positif dari publik. Perusahaan juga semakin mudah dalam

memperoleh modal dan melindungi sumber daya manusia yang berkualitas serta memajukan pengambilan keputusan pada penilai krusial sehingga akan memberikan kemudahan dalam mengelola manajemen risiko. Bagi masyarakat, dengan adanya CSR akan memajukan nilai tambah suatu perusahaan karena mengambil tenaga kerja dan menaikkan taraf sosial di daerah tersebut. Sementara bagi lingkungan, dengan dilakukannya praktik CSR akan menghindari pendayagunaan lebih atas SDA. Bagi negara, dengan adanya praktik CSR akan menghindari malpraktik bisnis dan negara akan menikmati *income* dari pajak yang wajar oleh perusahaan.

Sebelum adanya aturan yang mengatur, sudah ada banyak perusahaan yang melaksanakan CSR, lewat rencana Pembangunan masyarakat lokal, rencana lingkungan, serta pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Di Negara lain, CSR sudah sangat lazim dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Di Indonesia kegiatan CSR awalnya masih sangatlah minim, dimana kegiatan CSR dianggap sebuah suatu aktivitas sukarela perusahaan dan bukanlah kewajiban bagi entitas di Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia mengalami peningkatan kuantitas serta kualitasnya seiring berjalannya waktu. Kewajiban CSR diawali dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b dimana mewajibkan semua perusahaan investor baik perusahaan investor asing maupun dalam negeri untuk melaksanakan CSR. UU ini juga menyebutkan mengenai denda terhadap pelanggaran kewajiban tersebut yang tertera pada Pasal 34.

Selanjutnya pemerintah mewajibkan CSR terhadap Perseroan Terbatas pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74, dimana perusahaan yang mengoperasikan

dagangnya di bidang yang berhubungan dengan SDA wajib menjalankan CSR-. Pemerintah melalui UU tersebut ingin memperkuat dimensi sosial perusahaan, hal ini disebabkan oleh beragamnya permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan komunitas lokal di sekitar perusahaan tersebut. Untuk menjalankan kewajiban CSR, perusahaan harus membuat anggaran kegiatan CSR tersebut dan membebankannya sebagai dana perusahaan yang dilaksanakan dengan memantau kepatuhan dan kewajaran. Praktik CSR harus dimuat dalam *annual report* suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memutuskan tidak melakukan CSR, akan akan dikenai hukuman sesuai ketentuan Undang-undang.

Akan tetapi dalam implementasinya, banyak perusahaan yang cenderung enggan untuk melakukan CSR dikarenakan perusahaan menganggap CSR sebagai pengeluaran ekstra yang tidak menguntungkan dalam jangka pendek. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami inisiatif CSR sehingga tidak melaksanakannya. Bisnis tradisional yang belum mampu menyesuaikan diri dengan akuntabilitas lingkungan dan masyarakat biasanya mengalami hal ini. Hal ini berbeda dengan dunia usaha kontemporer dan badan usaha milik negara, yang mengakui nilai inisiatif CSR sebagai investasi. CSR dianggap dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai bentuk kampanye *public image* yang dapat memuaskan investor yang peduli akan citra investasinya.

2.1.3 CSR Disclosure

Menurut Rongiyati (2009), pengungkapan CSR dianggap sebagai metode komunikasi akibat sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan pada

pemangku kepentingan dan publik secara keseluruhan. Deegan (2002) mengemukakan jika pengungkapan CSR dapat dijadikan sebagai sarana yang dipakai manajer perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosial kepada komunitas secara umum yang bertujuan untuk mempengaruhi cara pandangnya pada perusahaan. Perusahaan dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan melakukan kegiatan CSR, yang didokumentasikan dalam laporan tahunan. Perusahaan yang mencoba menyesuaikan kegiatan mereka dengan aturan yang berlaku di masyarakat dapat dianggap sah dalam masyarakat dan tetap beroperasi. Menurut Deegan (2002) ada beragam alasan yang memotivasi manajer secara sukarela untuk mengungkapkan CSR, yaitu:

- a. Mengikuti persyaratan yang tercantum dalam undang-undang.
- b. Kepercayaan dalam prosedur akuntabilitas untuk menyampaikan, dimana manajer memiliki kepercayaan jika setiap orang berhak memperoleh informasi.
- c. Pertimbangan rasionalitas ekonomi, dimana pengungkapan CSR tersebut akan memberikan *profit* bisnis karena perusahaan melaksanakan 'hal yang benar' dan alasan tersebut akan dilihat sebagai motivasi.
- d. Untuk mengatur kelompok pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang kuat.
- e. Pemenuhan persyaratan perjanjian utang piutang, dimana lembaga pemberi utang sebagai bagian dari aturan manajemen risiko mendambakan agar *manager* menyampaikan informasi terkait kinerja dan kebijakan sosial serta lingkungan.
- f. dampak atas intimidasi terhadap legitimasi perusahaan.

- g. Mengikuti persyaratan industri.
- h. Memperoleh penghargaan atas pelaporan.

Pengungkapan CSR yang wajib dapat meningkatkan laporan keuangan perusahaan tetapi juga meningkatkan pengeluaran. Pengungkapan CSR banyak diukur memakai konsep GRI yang menjadi panduan untuk pengungkapan item apa saja dalam laporan CSR.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Dalam praktik bisnis, perusahaan biasanya berusaha untuk meminimalisir berbagai beban yang ditanggung perusahaan termasuk beban pajak dengan beragam cara. Bagi perusahaan, dengan adanya beban pajak akan mengurangi profit, maka dari itu manajer akan mencari bagaimana meminimalisir beban pajak dengan metode menggunakan kelemahan ketetapan perpajakan ataupun melalui metode lainnya. Sedangkan untuk pihak negara, pajak merupakan sumber anggaran atau pendapatan yang paling besar. Usaha meminimalisir pajak dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah langkah atau cara yang dilakukan oleh bisnis untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak yang berlaku. Kelemahan itu disebut dengan *grey area*, sebagai kelonggaran aturan di antara perancangan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tindakan penghindaran pajak ini dianggap tidak melewati batas aturan perpajakan dan praktik yang legal karena perusahaan hanya menggunakan kelemahan yang terdapat pada undang-undang perpajakan.

Terdapat tiga karakter utama penghindaran pajak berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2008), yaitu:

1. Adanya unsur *artificial* dimana seolah mengikuti berbagai ketentuan di dalamnya padahal tidak.
2. Menggunakan celah dari UU dan menerapkan berbagai ketetapan legal untuk berbagai tujuan.
3. Kerahasiaan, dimana secara umum pihak konsultan memperlihatkan metode untuk praktik penghindaran pajak dengan prasyarat wajib pajak menjalankan tata caranya dengan rahasia.

Annisa dan Kurniasih (2008) dalam risetnya menjabarkan penghindaran pajak adalah strategi pajak agresif yang dilaksanakan untuk meminimalisir beban pajak, dan di sisi lain praktik ini juga menghasilkan risiko berupa denda serta menurunnya reputasi perusahaan di mata umum.

Menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014), ada berbagai metode perusahaan mempraktikkan *tax avoidance*, yaitu:

- a. Melaksanakan transaksi *controlled foreign corporation*, *transfer pricing*, *treaty shopping*, *thin capitalization* dan transaksi yang tidak mempunyai esensi bisnis.
- b. Memilih opsi dengan beban pajak yang paling rendah untuk mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi.
- c. Mengalihkan subjek dan/atau objek pajak ke negara yang memiliki perlakuan pajak atau keringanan pajak khusus untuk pendapatan tertentu..

Perusahaan multinasional sering kali melakukan transfer pricing, yang melibatkan pemindahan keuntungan mereka ke anak perusahaan yang berlokasi di negara bebas pajak atau negara dengan tarif pajak rendah.

2.1.5 Biaya Modal Ekuitas

Pengembalian yang diinginkan investor ketika mereka memasukkan uang ke dalam suatu perusahaan disebut biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas adalah harga yang harus dibayar bisnis untuk mengumpulkan dana melalui penjualan saham preferen, saham biasa, atau investasi yang dilakukan dengan laba ditahan. Biaya modal ekuitas akan meningkat jika suatu organisasi memutuskan untuk menahan pendapatan dari sumber luar dengan menjual atau menerbitkan saham biasa tambahan.

Menurut Botoson (1997:341) tingkat pengungkapan dan risiko memengaruhi biaya modal ekuitas. Meningkatnya permintaan atas sekuritas korporasi atau penurunan biaya transaksi dapat mengakibatkan biaya modal ekuitas yang lebih rendah ketika terdapat lebih banyak pengungkapan yang diberikan kepada pasar. Jika risiko bisnis rendah, tingkat pengembalian yang diinginkan pihak penanam modal juga rendah, yang berarti biaya modal ekuitas bisnis rendah.

Menurut Natalia dan Sun (2013), jumlah pembiayaan modal ekuitas yang minimal menunjukkan bahwa bisnis berjalan dengan baik, yang berarti pemegang saham juga mengharapkan tingkat pengembalian yang rendah. Menurut teori portofolio, investor yang logis tidak akan memilih untuk mengambil lebih banyak risiko tanpa menerima keuntungan yang lebih tinggi. Untuk mengimbangi risiko yang terkait dengan investasi besar, pemegang saham memerlukan return yang

tinggi. Risiko dianggap sebagai dasar dalam menentukan untuk menerima ataupun menolak investasi sehingga dapat dikatakan biaya modal ekuitas dianggap menjadi faktor penentu yang signifikan untuk pemegang saham. Oleh karena itu, organisasi diwajibkan menangani informasi yang dicantumkan dalam *annual report* menjadi lebih *accountable*, sehingga pemegang saham akan merasakan yakin dengan informasi tersebut dan tidak menuntut *return* yang lebih tinggi pada perusahaan. Menurut Sayekti dan Wondabio (2007), salah satu tujuan pengungkapan CSR adalah memberikan informasi yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan dengan dasar peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi publik, sehingga pengungkapan CSR yang lebih baik menyebabkan pembiayaan ekuitas yang lebih rendah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Lanis dan Richardson (2013) melakukan studi dengan membandingkan pengungkapan CSR perusahaan yang agresif dan non-agresif di Australia. Hasil penelitian menunjukkan keterikatan positif antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR searah dengan teori legitimasi. Riset ini termasuk riset pertama yang menguji keterikatan empiris di antara agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR perusahaan dan memerikan alasan yang masuk akal mengenai penyebab beberapa perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi CSR. Octaviana & Rohman (2014) melakukan penelitian yang sama dengan yang diteliti oleh Lanis & Richardson (2013) dengan mengadaptasinya pada perusahaan properti dan pertambangan di Indonesia tahun 2009-2012. Hasil riset secara pasti menunjukkan

agresivitas pajak mempunyai pengaruh negatif pada CSR. Berbanding terbalik dengan Lanis dan Richardson (2013) menemukan bahwa entitas dengan agresivitas pajak yang rendah akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas untuk memperoleh perhatian masyarakat dan komunitas serta mengikuti prosedur pemerintah di sektor sosial dan ekonomi. Hasil yang berbanding terbalik didapatkan pada riset yang telah dilakukan oleh Arfiyanto & Ardiyanto (2017) dan Rahmawati & Rohman (2019), yang menunjukkan hasil yang sama dengan Lanis & Richardson (2013) yaitu terdapat keterkaitan yang positif antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR.

Kao & Liao (2020) melakukan penelitian untuk menguji bagaimana pengungkapan pajak perusahaan dalam laporan CSR dipengaruhi oleh perilaku penghindaran pajak. Hasil empiris memperlihatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak yang tingkatnya lebih tinggi menjurus lebih memberikan pengungkapan khusus pajak dalam laporan CSR mereka. Analisis *cross sectional* menunjukkan bahwa hubungan positif antara penghindaran pajak dan pengungkapan pajak dilemahkan ketika perusahaan memperlihatkan kapasitas CSR yang semakin baik dan tata kelola perusahaan yang lebih kuat. Secara kolektif hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tampaknya melegitimasi perilaku penghindaran pajak dengan memberikan lebih banyak pengungkapan pajak dalam laporan CSR agar dapat berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Drake et al. (2019) meneliti bagaimana investor menilai penghindaran pajak dan risiko pajak, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor menilai secara positif penghindaran pajak, akan tetapi

menilai risiko pajak secara negatif, dan yang paling penting risiko pajak yang lebih tinggi memoderasi penilaian positif penghindaran pajak. Dalam analisis tambahan, peneliti menemukan bahwa tindakan *tax avoidance* dan risiko pajak di saat yang sama memberikan pandangan tentang arus kas pajak masa depan. Temuan tersebut memberikan bukti baru tentang cara pajak mempengaruhi nilai perusahaan dan menyarankan agar penghindaran pajak dan risiko pajak harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Menurut riset yang telah diteliti oleh Dhaliwal et al., (2011) memperlihatkan jika biaya modal ekuitas yang tinggi pada tahun sebelumnya berkaitan positif pada pengungkapan CSR pada tahun sekarang. Namun pengungkapan CSR ditemukan tidak berhubungan secara signifikan dengan pergantian biaya modal ekuitas perusahaan di masa depan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan temuan Siregar et al. (2012) yang menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara biaya modal ekuitas tahun sebelumnya terhadap pengungkapan CSR di sektor Perbankan. Sementara itu, riset Hajawiyah et al. (2019) menunjukkan hasil sama dengan Dhaliwal et al. (2011) dimana terdapat keterkaitan positif di antara biaya modal tahun sebelumnya pada pengungkapan CSR. Namun, pengungkapan CSR ditemukan memiliki pengaruh negatif signifikan pada perubahan biaya modal ekuitas. Sehingga pengungkapan CSR yang semakin luas akan menghasilkan biaya modal ekuitas yang semakin rendah untuk tahun selanjutnya.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

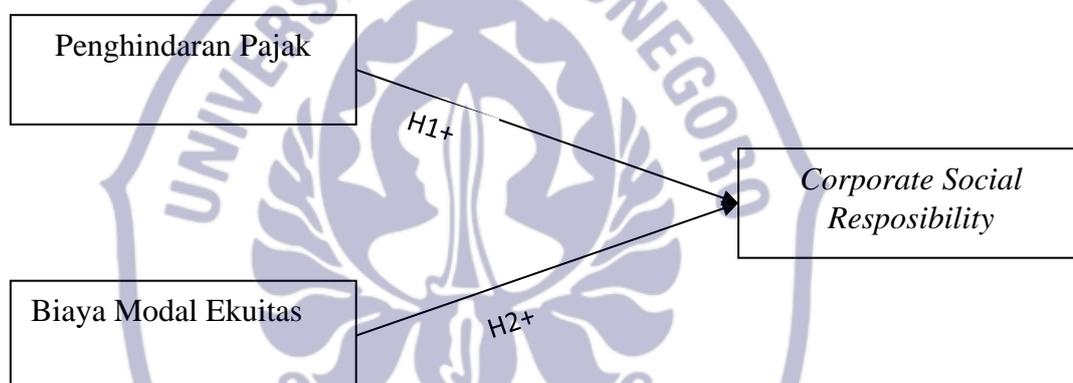
No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Lanis & Richardson (2013)	<i>Variable dependent:</i> Pengungkapan CSR <i>Variable independent:</i> Agresivitas pajak	Hasil riset memperlihatkan bahwa adanya keterikatan signifikan positif diantara agresivitas pajak perusahaan dan CSR disclosure, sejalan dengan teori legitimasi.
2	Octaviana & Rohman (2014)	<i>Variable dependent:</i> CSR <i>Variable independent:</i> Agresivitas pajak	Hasil penelitian membuktikan jika agresivitas pajak mempunyai dampak negatif pada CSR membuktikan perusahaan yang mempunyai agresivitas pajak rendah condong mengungkapkan CSR sebanyak mungkin.
3	Arfiyanto & Ardiyanto (2017)	<i>Variable dependent:</i> pengungkapan CSR <i>Variable independent:</i> Agresivitas pajak	Hasil penelitian memperlihatkan agresivitas pajak berhubungan positif pada CSR. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa entitas yang melaksanakan agresivitas pajak yang akan melakukan pengungkapan CSR lebih tinggi.
4	Rahmawati & Rohman (2019)	Variabel dependen : Pengungkapan CSR Variabel independen : Agresivitas pajak dan Profitabilitas	Hasil penelitian menyatakan bahwa agresivitas pajak mempunyai dampak signifikan positif pada pengungkapan CSR yang membuktikan bahwa entitas yang agresif pajak tinggi akan mengungkapkan CSR yang lebih banyak untuk meperoleh perhatian publik.
5	Kao & Liao (2020)	Variabel dependen : Pengungkapan khusus pajak dalam laporan CSR Variabel independen : Penghindaran pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan khusus pajak dalam laporan CSR. Hasil ini mendukung teori legitimasi dimana perusahaan tampaknya

			melegitimasi perilaku penghindaran pajak mereka dengan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait pajak dalam laporan CSR mereka.
6	Drake et al. (2019)	Variabel dependen : logaritma nilai pasar ekuitas Variabel independen : Penghindaran pajak dan Risiko pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor menilai secara positif penghindaran pajak, akan tetapi menilai risiko pajak secara negatif, dan yang paling penting risiko pajak yang lebih tinggi memoderasi penilaian positif penghindaran pajak. Peneliti menyarankan bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak harus dipertimbangkan secara bersamaan.
8	Dan S. Dhaliwal, Oliver Zhen Li, Albert Tsang and Yong George Yang (2011)	Variabel dependen : CSR & biaya modal ekuitas yang lebih rendah Variabel independen : biaya modal ekuitas & CSR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya modal ekuitas yang tinggi pada tahun sebelumnya berhubungan positif dengan pengungkapan CSR pada tahun sekarang. Namun pengungkapan CSR ditemukan tidak berhubungan secara signifikan dengan perubahan biaya modal ekuitas perusahaan di masa depan.
9	Shanty Debora Yutriny Sirait, Sylvia Veronica Siregar (2012)	Variabel dependen : CSR & biaya modal ekuitas yang lebih rendah Variabel independen : biaya modal ekuitas & CSR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat ditemukan hubungan signifikan antara biaya modal ekuitas tahun sebelumnya terhadap tingkat pengungkapan CSR.
10	Ain Hajawiyah, Desi Adhariani, dan Chaerul	Variabel dependen : CSR & biaya modal ekuitas yang lebih rendah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif diantara biaya modal tahun sebelumnya terhadap pengungkapan CSR. Namun, pengungkapan CSR ditemukan memiliki dampak negatif

Djakman (2019)	Variabel independen : biaya modal ekuitas & CSR Variabel moderasi : perusahaan keluarga	signifikan kepada perubahan biaya modal ekuitas.
----------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Penghindaran Pajak dan Pengungkapan CSR

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya, dengan menggunakan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam UU atau aturan pajak lainnya. Menurut Deegan et al. (2002), perusahaan yang ketahuan menerapkan praktik penghindaran pajak akan lebih cenderung mengiklankan CSR di berbagai bidang untuk mendapatkan perhatian publik sejalan dengan teori legitimasi. Berdasarkan pendapat tersebut bisa didefinisikan saat suatu perusahaan semakin meningkatkan

penghindaran pajaknya maka perusahaan akan juga meningkatkan pengungkapan CSR.

Sekalipun kegiatan penghindaran pajak tidak searah dengan nilai-nilai dan apa yang diinginkan masyarakat, perusahaan saat ini akan berupaya untuk melakukan penyamaran dengan cara melakukan aktivitas CSR-nya secara lebih tinggi ke masyarakat untuk mengganti cara pandang dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pernyataan ini di dukung oleh Lanis dan Richardson (2013) mengatakan bahwa entitas yang sudah pasti melakukan penghindaran pajak dapat mengikuti teori legitimasi dengan mengungkapkan CSR tambahan secara bertahap.. Hal ini memiliki makna yang mengindikasikan penghindaran pajak dapat memberikan dorongan perusahaan untuk melaksanakan suatu aktivitas dan pelaporan CSR yang lebih banyak. Riset yang diteliti oleh Arfiyanto & Ardiyanto (2017) dan Rahmawati & Rohman (2019) membuktikan bahwa agresivitas pajak memiliki dampak positif pada CSR, sehingga perusahaan yang agresif pajak akan melakukan pengungkapan informasi CSR secara berlebihan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H1 : Penghindaran pajak secara positif mempengaruhi pengungkapan CSR yang lebih luas.

2.4.2 Biaya Modal Ekuitas dan Pengungkapan CSR

Biaya modal ekuitas dimaknai sebagai tingkat pengembalian yang di harapkan investor setelah menaruh modalnya di suatu perusahaan. Pengembalian tersebut dianggap sebagai alasan yang mendorong investor dalam melakukan investasi. *Cost of equity* yang rendah mengindikasikan risiko yang rendah maka

dari itu tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor akan menjadi rendah. Tetapi dalam sudut pandang lain, semakin meningkatnya risiko investasi maka semakin meningkat pula tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan kepada penanam modal. Investor akan menentang untuk menaikkan risiko investasinya tanpa diimbangi pengembalian yang meningkat. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan bisa mengelola informasi yang dilampirkan dalam *annual report* menjadi bagus dan terpercaya, sehingga penanam modal akan merasa aman dengan informasi yang diberikan dan tidak meminta pengembalian yang lebih besar.

Investor saat ini tidak hanya memikirkan informasi terkait *financial* saja, tetapi juga *non-financial*, termasuk yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan. Menurut teori legitimasi, biaya modal ekuitas yang tinggi akan membuat perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR-nya dengan tujuan untuk menurunkan risiko, hal ini dikarenakan pengungkapan CSR dapat membantu perusahaan membangun citra positif dan reputasi yang baik di masyarakat. Dalam konteks biaya modal ekuitas, citra positif ini dapat mengurangi persepsi risiko oleh investor, yang nantinya akan mengurangi biaya modal ekuitas. Pernyataan ini searah dengan riset yang diteliti Dhaliwal et al., (2011) dimana jika biaya modal ekuitas yang tinggi pada tahun sebelumnya berhubungan positif dengan pengungkapan CSR pada tahun sekarang. Penelitian dilakukan Hajawiyah et al., (2019) menunjukkan hasil yang sama sehingga membuktikan bahwa biaya modal ekuitas yang tinggi akan menyebabkan perusahaan berusaha meningkatkan pengungkapan CSRnya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu:

H2 : Biaya modal ekuitas secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang lebih luas.



BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi tentang deksripsi variabel operasional, sampel dan populasi pada penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik mengumpulkan data, dan langkah yang digunakan untuk menganalisis data.

3.1 Variabel dan Definisi Operasional

Riset ini mempunyai dua jenis *variable* untuk mengukur hipotesis yang diajukan. *Variable* tersebut yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dapat didefinisikan sebagai variabel yang di akibatkan atau yang berperan sebagai dampak dari keberadaan variabel independen. Variabel dependen seringkali dikatakan sebagai *variable output*, kriteria, konsekuen, ataupun variabel terikat. Variabel dependen yang dipakai pada riset ini adalah *Coorporate Social Responsibility (CSR)*. CSR disebut juga sebagai konsep yang mewajibkan perusahaan untuk mempunyai pantauan yang lebih luas, dimana perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab kepada *shareholders*, namun juga terhadap pihak-pihak lainnya seperti karyawan, *client*, supplier, dan kelompok lainnya. Dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007, Pasal 74 mengenai "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", pemerintah menetapkan ketentuannya untuk CSR.

Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan Standar GRI, dimana mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018 yang terdiri dari 60 pengungkapan umum, 9 pendekatan manajemen, dan 82 pengungkapan spesifik. Penggunaan *standard* GRI tersebut untuk memberikan indikator pengungkapan yang lebih luas bagi perusahaan sesuai dengan tujuan penelitian. Perusahaan menggunakan standar GRI, yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dikarenakan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk pelaporan berkelanjutan. Menurut studi yang dilakukan KMPG, standar ini bahkan merupakan standar yang paling banyak digunakan untuk laporan keberlanjutan (Mecarone, 2023).

Apabila perusahaan mengungkapkan satu item perusahaan CSR, maka diberi nilai satu dan apabila tidak mengungkapkan maka nol. Berikutnya *score* dari seluruh item dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah item pengungkapan yang diinginkan bagi setiap perusahaan.

$$CSR D = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Ket:

CSR D : Indeks pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai 1 apabila item diungkapkan, 0 apabila tidak diungkapkan

n_i : total item untuk perusahaan i

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen diartikan sebagai variabel yang memberikan akibat dan yang memerankan dampak perubahan dan timbulnya variabel dependen.

Variabel independen yang ada pada riset ini yaitu penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas.

3.1.2.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai cara penghematan pajak yang muncul menggunakan aturan perpajakan secara legal agar meminimumkan kewajiban pajaknya. Metode untuk mengkalkulasi *tax avoidance* yaitu memakai cara *Cash ETR*. Berdasarkan Dyreng et al. (2008) CETR dapat dipakai untuk mengilustrasikan tindakan penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi. Perubahan yang signifikan dalam CETR dari tahun ke tahun atau perbandingan CETR perusahaan dengan rata-rata industri dapat memberikan petunjuk bahwa suatu perusahaan mungkin menggunakan strategi penghindaran pajak tertentu, karena itulah pada penelitian ini menggunakan CETR. CETR merupakan total kas pajak yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan jumlah laba sebelum pajak, dengan rumus:

$$CETR = \frac{CashTaxPaid, t}{PretaxIncome, t}$$

Dimana

CETR : ETR berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan

Cash Tax Paid : jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan

Pretax Income : laba sebelum pajak

3.1.2.2 Biaya Modal Ekuitas (COE)

Biaya modal ekuitas atau *Capital of Equity* (COE) diukur memakai metode CAPM (*Capital Asset Pricing Model*). CAPM dianggap sebagai metode kalkulasi

dalam Analisa penjabaran *return* yang diinginkan dari efek atau sekuritas/surat berharga. Model CAPM adalah model yang paling sering digunakan dalam menghitung imbal hasil yang diharapkan. CAPM memformalkan basis dari investasi, yaitu bahwa semakin banyak risiko yang ditanggung, semakin banyak pula imbal hasil yang diinginkan. Berikut adalah rumus dari CAPM;

$$COE = R_f + \{ \beta \times (R_m - R_f) \}$$

Ket:

COE : *Expected return sekuritas*

R_f : *Risk-free rate* atau tingkat bebas risiko

B : Beta saham

R_m : *Expected return of the market*

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Pada riset ini, populasi memakai data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2019-2022. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur adalah disebabkan banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia dimana mayoritas perusahaan tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan manufaktur, ditambah banyaknya permasalahan tentang agresivitas pajak yang ada di perusahaan manufaktur di bandingkan perusahaan lainnya.

3.2.2. Sampel

Dalam pemilihan sampel, riset ini memakai metode *purposive sampling*, dengan upaya pengambilan sampel menurut kriteria atau estimasi yang ditentukan sendiri subjeknya oleh peneliti. Berikut ini kriteria pemilihan *sample* yang dilakukan:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022.
2. Perusahaan yang dalam *financial reporting* memakai satuan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan yang tidak memiliki perhitungan laba yang negatif pada periode 2019-2022.
4. Perusahaan yang memiliki laporan tahunan periode 2019-2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai sebuah data yang tidak didapatkan langsung alias harus turun langsung ke lapangan, melainkan hanya melalui sumber penyedia data atau informasi dan data yang diterbitkan secara global. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari *annual reporting*, *sustainability reporting*, dan *financial reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didapatkan dari laman resmi BEI www.idx.co.id, laman resmi yang dimiliki perusahaan dan laman finance.yahoo.com.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dari sumber yang ada, yaitu dari *annual reporting*, *sustainability reporting*, dan

financial reporting perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didapatkan dari laman resmi BEI www.idx.co.id, laman resmi yang dimiliki perusahaan dan laman finance.yahoo.com. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data melalui telaah, eksplorasi, dan analisis berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal, buku, dan e-book.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011) statistik deskriptif dimanfaatkan sebagai cara menyampaikan deskripsi tentang distribusi, *mean*, *standard deviation*, maksimum, dan minimum di setiap *variable* yaitu pengungkapan CSR, penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Validitas model regresi dinilai dengan menggunakan uji asumsi klasik (Ghozali, 2011). Empat jenis uji asumsi berbeda digunakan dalam penelitian ini: autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Langkah pengujian ini meliputi penentuan apakah variabel perancu atau variabel residual yang berdistribusi normal dimasukkan dalam model regresi. Skor residual dikatakan mengikuti distribusi normal dengan uji t dan uji F. Jika skor tidak normal, tes dianggap tidak valid. Suatu teknik untuk menerapkan pengujian normalitas statistik untuk memastikan apakah variabel terdistribusi normal, yaitu uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi probabilitas uji data Monte Carlo Sig lebih besar dari 0,05.

Namun nilai signifikansi probabilitas uji Monte Carlo Sig kurang dari 0,05 akan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah model regresi mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel independen. Skenario yang disebut multikolonieritas terjadi ketika terdapat korelasi antara beberapa variabel independen. Model korelasi yang baik tidak mempunyai korelasi antar variabel independennya. Skor Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) dapat digunakan untuk menentukan multikolonieritas dalam model regresi. Ghozali (2013) menyatakan jika skor toleransi lebih besar dari 0,10 atau setara dengan VIF kurang dari 10, maka skor cutoff inilah yang paling sering digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian dilaksanakan dengan tujuan menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Santoso, 2012). Autokorelasi secara garis besar ditemukan pada regresi yang datanya bersifat *time series*, dapat disebutkan bahwa ciri khas pengujian ini adalah waktu. Pendeteksian gejala autokorelasi dapat memakai uji Durbin - Wastson (D-W). Santoso (2012) menyatakan ketentuan keberadaan gejala autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW berada dibawah -2 berarti terjadi gejala autokorelasi positif.

2. Apabila nilai DW berada di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.
3. Apabila nilai DW terletak diatas +2 berarti terjadi gejala autokorelasi negatif.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitiannya Ghozali (2011) menyatakan jika percobaan ini dilaksanakan untuk mencoba apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Ghozali (2011), terdapat berbagai metode dalam menguji heteroskedastisitas, salah satunya yaitu dengan memakai *chart* (diagram scatterlot) sebagai berikut:

1. Tidak ada heteroskedastisitas apabila polanya jelas dan titik-titik tersebar ke bawah atau ke atas angka 0 dan pada sumbu Y..
2. Pola yang terdiri dari titik-titik yang saling bergerombol dan terpantau dalam bentuk pola yang teratur seperti melebar, menyempit, atau bergelombang menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa hipotesis merujuk pada populasi. Uji hipotesis merupakan proses yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas untuk memastikan apakah suatu hipotesis menggambarkan pernyataan yang akurat. Data selanjutnya digunakan untuk memverifikasi kelayakan pernyataan.

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda didefinisikan sebagai model regresi linear yang mengaitkan >1 *variable independent or predictor*. Dalam riset ini memakai analisis regresi linear berganda dikarenakan tujuan dari analisis linear berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan untuk uji hipotesis sebagai berikut:

$$CSRDi = \alpha_0 + \beta_0 + \beta_1 CETR + \beta_2 COE + \varepsilon$$

Keterangan:

$CSRDi$ = Pengungkapan CSR perusahaan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

$CETR$ = Penghindaran pajak (Cash ETR)

COE = Biaya Modal Ekuitas

ε = Error

3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menentukan kapasitas model untuk menggambarkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1.

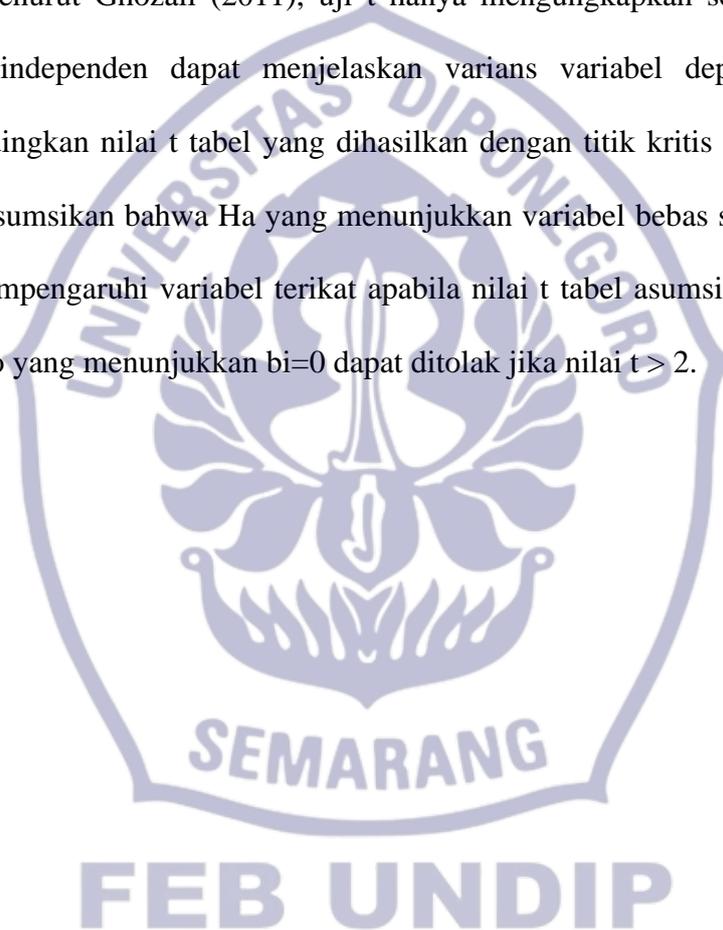
3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F secara teori hanya mengungkapkan apakah masing-masing variabel independen yang ingin dikendalikan oleh model berpengaruh langsung terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Menggunakan *quick look* yang

memiliki ambang kepercayaan 5% untuk menolak H_0 . Selanjutnya H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai F lebih besar dari 4 dan perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel.

3.5.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghozali (2011), uji t hanya mengungkapkan sejauh mana satu variabel independen dapat menjelaskan varians variabel dependen. Dengan membandingkan nilai t tabel yang dihasilkan dengan titik kritis pada tabel maka dapat diasumsikan bahwa H_a yang menunjukkan variabel bebas secara individual dapat mempengaruhi variabel terikat apabila nilai t tabel asumsi lebih besar dari nilai t . H_0 yang menunjukkan $\beta_i=0$ dapat ditolak jika nilai $t > 2$.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Di dalam hasil dan analisis, akan dipaparkan pembahasan dari hasil riset yang sudah diolah dengan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Bagian pertama pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari objek yang diteliti. Kemudian pada *section* selanjutnya berisi analisa data yang terdiri dari analisis *statistic* dekriptif, uji asumsi *clasic* serta analisa regresi berganda. Pada *section* tiga terdapat interpretasi atas riset.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Riset ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang apakah penghindaran pajak dan biaya modal ekuitas dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Objek atas riset yang dilakukan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2019-2022. Peneliti memakai data sekunder yang bersumber dari *annual reporting* perusahaan manufaktur yang dipublikasikan pada *website* resmi perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari 214 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, *sample* riset hanya sebanyak 69 perusahaan. *Sample* riset ditentukan metode *purposive sampling* yang memenuhi kriteria adalah:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total
1	Total Perusahaan Manufaktur yang tercatat di BEI pada 2019-2022 yang menerbitkan <i>annual report</i> yang didalamnya berisi pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan.	214
2	Perusahaan yang memakai satuan mata uang rupiah	(14)
3	Perusahaan yang mempunyai laba negatif pada tahun 2019-2022	(98)
4	Perusahaan yang memiliki <i>annual report</i> lengkap periode 2019-2022	(32)
5	Data outlier	1
	Total perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian	69
	Total tahun penelitian	4
	Jumlah <i>sample</i> penelitian tahun pengamatan	276

Berdasarkan *table 4.1* perusahaan manufaktur yang *listed* pada BEI tahun 2019 hingga 2022 terdapat 214 perusahaan yang menjadi total populasi pada riset ini, namun tidak semua perusahaan memenuhi kriteria penelitian dimana terdapat 14 perusahaan yang memakai satuan mata uang selain rupiah, 98 perusahaan yang mempunyai laba negatif, 32 perusahaan yang memiliki laporan tahunan tidak lengkap, dan 1 data outlier. Oleh karena itu, hanya 69 perusahaan yang lolos kriteria sampel akan diteliti lalu dikalikan dengan total tahun pengamatan selama 4 tahun sehingga didapatkan jumlah *sample* sebanyak 276 sampel yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses olah data.

4.2 Analisis Data

Analisis dilakukan memakai perangkat lunak IBM SPSS25. Tujuan dari analisis adalah untuk mencoba hipotesis dengan analisis regresi linear berganda yang akan dijabarkan pada bagian ini.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	276	0,0017	15,9311	0,407318	1,0351680
COE	276	-0,0751	0,1223	0,028290	0,0235462
CSR	276	0,4123	0,5686	0,478287	0,0286304

Sumber: Olah data, 2023

Pada penelitian ini, CETR merupakan proksi penghindaran pajak. Nilai minimumnya yaitu 0,0017 yang dimiliki PT Star Petrochem Tbk tahun 2020. Sementara *score* maksimum dari CETR adalah 15,9311 oleh PT Buyung Poetra Sembada Tbk pada tahun 2022. *Score mean* CETR diperoleh sebanyak 0,407318, sedangkan *standard deviation* 1,0351680. Melalui hasil tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata penghindaran pajak yang dipraktikkan perusahaan sebesar 40%. *Score mean* yang lebih kecil dibandingkan *standard deviation* berarti membuktikan penyebaran data yang kurang bervariasi.

Biaya modal ekuitas diproksikan dengan COE. Nilai minimum -0,0751 oleh PT Semen Baturaja Tbk pada 2019. Sementara *score* maksimal dari CAPM 0,1223 yang dimiliki PT Gaya Abadi Sempurna Tbk pada 2019. *Score mean* COE diperoleh 0,028290, sedangkan *standard deviasinya* 0,0235462. *Score mean* yang didapat lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya menunjukkan sebaran data yang merata.

Pengungkapan CSR diproksikan dengan CSR. Nilai minimal dari CSR sebesar 0,4123 oleh PT Aneka Gas Industri Tbk pada 2019. Sementara *score* maksimalnya 0,5686 oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada 2022. *Score mean*

CSRD 0,478287. *Score mean* yang lebih besar jika dilakukan perbandingan dengan *score standard deviation* 0,0286304 menggambarkan sebaran data sudah merata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data variabel terikat dan bebas dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Hasil uji ini berperan sebagai penentu dilakukannya pengujian hipotesis penelitian. Pembuktian atas normalitas data dapat dilaksanakan memakai uji non-parametik yaitu *One Sample Kolmogorov-Smirnov* melalui syarat tingkatan signifikan $> 0,05$ dinyatakan normal dengan hasil berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			276
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,02533244
Most Extreme Differences	Absolute		0,063
	Positive		0,063
	Negative		-0,063
Test Statistic			0,063
Asymp. Sig. (2-tailed)			,010 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,207 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,196
		Upper Bound	0,217

Sumber: Olah data, 2023

Hasil yang tersaji dalam *table* 4.3 disimpulkan bahwa dari total sampel sebanyak 276 ditemukan data terdistribusi normal Sig. 0,207 > 0,05 dengan nilai monte carlo.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Pada percobaan ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan apakah dalam penelitian ini terdapat hubungan antar variabel independen pada suatu model regresi. Jika data variabel pada nilai *tolerance* ditemukan < 0,10 atau VIF > 10 sehingga *variable* tersebut berkorelasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Mutikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CETR	0,997	1,003
	COE	0,997	1,003

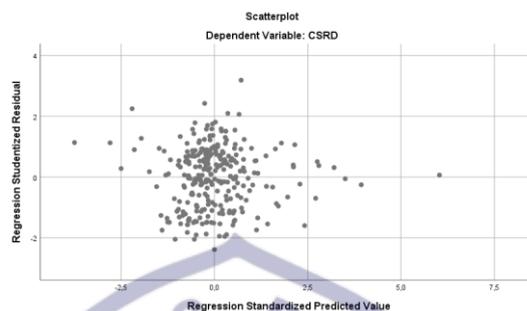
Sumber: Olah data, 2023

Berdasarkan hasil percobaan yang tersaji di *table* 4.4 memperlihatkan *score tolerance* tiap *variable independent* lebih dari 0,1 dengan skor VIF <10. Dari uji ini, memperoleh kesimpulan bahwa tidak adanya multikolinearitas di antara *variable independent*.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Percobaan ini bertujuan untuk meninjau ketidaksamaan varians di tengah-tengah residu di dalam suatu model regresi dari satu *variable* ke *variable* lain. Cara untuk dapat melihat eksistensi dari heteroskedastisitas dilaksanakan dengan grafik *scatterplots* serta diperjelas dengan uji *glejser*.

Gambar 4.1
Scatterplot



Menurut grafik *scatterplot* yang terdapat pada Gambar 4.1, plot tersebut secara merata di antara angka 0 pada sumbu Y yang memiliki arti tak ada heteroskedastisitas. Dalam memperjelas, akan dipaparkan pada *table* uji *glejser* di bawah ini:

Tabel 4.5
Uji Glejser

Variabel	Sig
CETR	0,130
COE	0,128

Sumber: Olah data, 2023

Tabel 4.5 menjelaskan *output* pada seluruh *variable independent* pada riset ini mempunyai tingkat signifikan $> 0,05$ kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Percobaan ini dilaksanakan untuk meninjau kesalahan pengganggu pada suatu model regresi linear berganda pada tahun t dengan kekeliruan pada tahun sebelumnya ($t - 1$). Uji Darbin Watson dapat digunakan dalam mendeteksi (kesalahan Pengganggu) dari satu observasi ke observasi lain yang ada pada riset ini. Dalam memperkuat penjelasan, akan dipaparkan pada *table* 4.6.

Tabel 4.6
Uji Darbin-Watson

Model Summary ^b			
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,211	0,0254251	1,079

Sumber: Olah data, 2023

Output pengolahan data yang tersaji di tabel 4.6 diperoleh skor Durbin-Watson senilai 1,079. *Score* D-W terletak diantara -2 dan +2, sehingga berhasil ditarik kesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Percobaan ini dilakukan dengan meninjau kapabilitas model saat mendeskripsikan seberapa besar terjadinya perubahan atas dampak yang diberikan variabel independen secara simultan atau bersamaan dalam memberikan dampak pada variabel dependen. Nilai yang dipakai pada uji ini ditunjukkan dari R^2 yang berada diantara *range* 0 hingga 1.

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 ^a	0,217	0,211	0,0254251

Sumber: Olah data, 2023

Dari tabel 4.8 didapatkan angka *adjusted R square* 0,211 yang mengindikasikan *variable* CETR dan COE secara simultan memiliki dampak pada variabel CSRD sebesar 21,1%. Sedangkan sisanya disebabkan oleh *variable* lain diluar persamaan regresi atau *variable* yang tidak diteliti.

4.2.3.2 Uji F-test

Riset ini bertujuan untuk menemukan apakah terdapat dampak keseluruhan variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Temuan riset ini akan dipaparkan pada *table* 4.9.

Tabel 4.8
Uji F Test

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,049	2	0,024	37,855	,000 ^b
	Residual	0,176	273	0,001		
	Total	0,225	275			

Sumber: Olah data, 2023

Pada *table* 4.9 diperhatikan apabila *score significance* yang didapatkan $0,000 < 0,05$. Apabila model regresi secara signifikan menjabarkan hubungan variabel independen yang pada riset ini *variable* CETR dan COE secara signifikan mempengaruhi CSRD sehingga model regresi ini sah untuk digunakan.

4.2.3.3 Uji T-test

Percobaan ini dilaksanakan untuk meninjau potensi setiap variabel independen dalam penelitian untuk mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Hasil dari olahan data dianalisis menggunakan nilai probabilitas $< 0,05$.

Tabel
4.9 Uji T Parsial

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,491	0,002		200,553	0,000
	CETR	0,005	0,001	0,192	3,579	0,000
	COE	-0,528	0,065	-0,434	-8,103	0,000

Sumber: Olah data, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji hipotesis 1 mengenai pengaruh CETR terhadap CSRD menampilkan signifikansi 0,000 dengan t hitung 3,579. Maka mengindikasikan variabel ini secara parsial mempunyai dampak signifikan dan berkorelasi positif terhadap CSR. Oleh sebab itu, H1 diterima.

Sementara itu, pada uji hipotesis 2 mengenai pengaruh COE terhadap CSRD menampilkan signifikansi 0,000 dengan t hitung -8,103. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *variable* ini secara parsial memiliki dampak yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap CSR. Oleh sebab itu, H2 ditolak.

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR	Diterima
H2	Biaya modal ekuitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR	Ditolak

4.3 Interpretasi Hasil

Sub bab interpretasi hasil akan memaparkan hasil uji dari hipotesis yang diajukan. Interpretasi akan berisi kalimat penjelasan berupa argumentasi dan perbandingan dengan hasil dari penelitian sebelumnya menurut teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam riset ini.

4.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Pengungkapan CSR

Semakin tinggi penghindaran pajak yang dipraktikkan suatu perusahaan maka akan semakin luas juga pengungkapan CSRnya. Secara parsial, penghindaran pajak mempunyai dampak signifikan positif pada pengungkapan CSR. Hal ini searah dengan riset yang telah diteliti Arfiyanto & Ardiyanto (2017) dan Rahmawati & Rohman (2019) memperlihatkan bahwa agresivitas pajak mempunyai dampak positif pada CSR, Oleh karena itu, perusahaan yang agresif cenderung memberikan informasi CSR yang berlebihan. Pendapat yang dibuat oleh Lanis dan Richardson (2013) bahwa perusahaan yang telah secara konsisten menerapkan penghindaran pajak dapat berkorelasi dengan teori legitimasi jika mereka terus mengungkapkan CSR. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak mampu menstimulasi sebuah perusahaan melaksanakan praktik dan pelaporan aktivitas CSR yang lebih banyak.

Teori legitimasi membuktikan bahwa perusahaan dengan legitimasi sosial yang terancam lebih cenderung membuat pengungkapan yang mementingkan diri sendiri untuk melegitimasi perilaku mereka. Sehingga Perusahaan yang lebih agresif pajaknya pasti akan menyediakan lebih banyak CSR *disclosure* untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Biaya Modal Ekuitas terhadap Pengungkapan CSR

Perusahaan yang menganggap biaya modal ekuitas sebagai beban, sudah pasti akan berusaha memiliki pembiayaan modal ekuitas yang rendah pula. Menurut teori legitimasi, salah satu dorongan perusahaan untuk meningkatkan

pengungkapan CSR-nya merupakan biaya modal ekuitas yang tinggi. Meninjau tingginya biaya modal ekuitas, perusahaan akan berusaha meningkatkan pengungkapan CSR-nya dengan tujuan untuk menurunkan risiko, sehingga *expected return* yang diharapkan oleh pemegang saham juga rendah dan perusahaan mengeluarkan biaya modal ekuitas yang rendah pula. Meskipun begitu, hasil riset menghasilkan biaya modal ekuitas mempunyai dampak signifikan serta berkolerasi negatif pada tingkat pengungkapan CSR. Artinya, biaya modal ekuitas yang rendah menyebabkan Perusahaan semakin mengungkapkan CSR-nya.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan investor menganggap citra perusahaan baik sehingga terdapat anggapan bahwa investasi yang dilakukan aman dan berkelanjutan. Biaya modal ekuitas yang rendah artinya risiko yang rendah dan informasi yang transparansi, dan untuk itu pula sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan mengadakan praktik CSR yang baik karena dapat menciptakan nilai jangka panjang untuk perusahaan, seperti kepercayaan konsumen, loyalitas merek, dan keberlanjutan operasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian di lakukan dengan tujuan menyelidiki apakah ada hubungan antara penghindaran pajak (CETR) dan biaya modal ekuitas (COE) dengan pengungkapan CSR. Adapun objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022. Penetapan *sample* dikerjakan melalui cara *purposive sampling* dan terpilih 276 sampel yang memenuhi kriteria penilaian. Metode penelitian yang diterapkan adalah regresi linear berganda yang kemudian data diolah dan dianalisis. Bersumber pada hasil riset dan pembahasan yang sudah diteliti, sehingga bisa ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Penghindaran pajak (CETR) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR dengan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hal ini mengindikasikan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilaksanakan suatu Perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung meningkatkan pengungkapan CSR mereka.
2. Biaya modal ekuitas (COE) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai biaya modal ekuitas yang rendah, maka perusahaan tersebut mempunyai pengungkapan CSR yang tinggi.

5.2 Keterbatasan

Bagian ini menjelaskan beberapa dependensi yang terdapat pada riset ini mengingat adanya beberapa faktor yang membatasi cakupan dan hasil yang diperoleh seperti berikut:

1. Dari 214 populasi perusahaan manufaktur yang ada, hanya 69 sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini. Artinya, hanya 32% perusahaan manufaktur yang digunakan dan mewakili perusahaan manufaktur.
2. Pada awalnya, data tidak berdistribusi normal ketika menggunakan uji normalitas asymp sig. (2-tailed), sehingga mencoba menggunakan monte carlo sig dan ditemukan hasil signifikansi diatas 0,05. Asymptotic sigma memiliki kelemahan yang akan menghasilkan data tidak terdistribusi normal, yaitu saat data kecil, data tidak seimbang, dan data terdistribusi buruk. Sehingga selain menggunakan persamaan asymp, dapat juga menggunakan monte carlo. Hal ini dikarenakan penggunaan uji biaya modal ekuitas yang menggunakan CAPM, sehingga didapat hasil data yang kecil.

5.3 Saran

Bagian ini menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kualitas penelitian ini. Berikut beberapa saran yang diajukan sebagai panduan untuk mengoptimalkan keseluruhan konsep, metodologi, serta hasil penelitian ini.

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan sektor lain selain perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan sektor pertambangan dan dapat menambahkan variabel independen lain selain CETR dan COE, yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR, misalnya biaya utang.

2. Peneliti berikutnya dapat menggunakan metode perhitungan biaya modal ekuitas lain selain CAPM, seperti metode APT (*Arbitrage Pricing Theory*).



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N. (2022, March 30). Mantap, Finalis TOP CSR Awards 2022 Meningkatkan 10 Persen. *TOP Business*.
<https://www.topbusiness.id/62184/finalis-top-csr-awards-2022-meningkat-10-persen.html>
- amerta. (2018, April 25). *Perkembangan CSR di Indonesia*. Amerta Sustainability Management Specialist.
<https://www.amerta.id/2018/04/25/1304/perkembangan-csr-di-indonesia.php>
- Annisa, Nuralifmida A., and Lulus Kurniasih. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 8, no. 2, 2012, pp. 123-136, doi:[10.14710/jaa.v8i2.4352](https://doi.org/10.14710/jaa.v8i2.4352)
- Arfiyanto, R., & Didik Ardiyanto, M. (2017). PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 6, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Chen, Y. C., Hung, M., & Wang, Y. (2018). The effect of mandatory CSR disclosure on firm profitability and social externalities: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics*, 65(1), 169–190.
<https://doi.org/10.1016/J.JACCECO.2017.11.009>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312–343.
<https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. *Accounting Review*, 86(1), 59–100.
<https://doi.org/10.2308/accr.00000005>
- El Ghouli, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? *Journal of Banking & Finance*, 35(9), 2388–2406. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.02.007>
- Febrianto, N. (2019, July 16). *Kronologi Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo 2006-2019*. Tagar.Id.
- Feronika, E. S., Rahma Silva, K., & Raharjo, S. T. (2020). *TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN*. www.csr.gov.uk

- Gallemore, J., Labro, E., & Gallemore, J. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 147–167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. Dan A. Chariri. 2014. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Hajawiyah, A., Adhariani, D., & Djakman, C. (2019). The sequential effect of CSR and COE: family ownership moderation. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 939–954. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2017-0179>
- Handoyo. (2018, December 12). Sampoerna Gandeng Yayasan Bhakti Asdiraa tingkatkan minat warga untuk berwirausaha. *Nasional.Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sampoerna-gandeng-yayasan-bhakti-asdiraa-tingkatkan-minat-warga-untuk-berwirausaha>
- Jhonatan sofian. (2007). *Mencari Bentuk Ideal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. <https://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/mencari-bentuk-ideal-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/#more-335>
- Kao, W. C., & Liao, C. H. (2021). Tax avoidance and tax disclosures in corporate social responsibility reports in the United Kingdom. *Journal of International Accounting Research*, 20(3), 59–80. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2020-036>
- Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: John Willey and Sons, Inc.
- Lanis, R., & Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory, *Accounting Auditing and Accountability & Journal*, 26, 75-100
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Mecarone, S. da F. (2023, March 15). *GRI Standards; what are and why they're the most used* . Karmametrix.Com. <https://karmametrix.com/blog/eco-sustainability/gri-standards-what-are-and-why-they-are-the-most-used/>

- Melinda, O. G., & Syafruddin, M. (2021). PENGARUH CSR DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP RISIKO PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 10(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- nasional.kontan.co.id. (2019, May 8). Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. *Nasional.Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Natalia, D., & Sun, S.E. (2013). ANALISIS PENGARUH WAJIBNYA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP BIAYA EKUITAS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2012.
- Octaviana, N. E., & Rohman, A. (2014). PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : UNTUK MENGUJI TEORI LEGITIMASI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 03, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahmawati, A. P., & Rohman, A. (2019). PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN TEHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). *PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SARANA LEGITIMASI: DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT AGRESIVITAS PAJAK: Vol. IV*.
- Reverte, C. (2012). The Impact of Better Corporate Social Responsibility Disclosure on the Cost of Equity Capital. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 19(5), 253–272. <https://doi.org/10.1002/csr.273>
- Salsabila, A. (2023, January 31). *Mengenal Konsep Triple Bottom Line (3P) dan Implementasinya*. Lindungihutan. <https://lindungihutan.com/blog/mengenal-konsep-triple-bottom-line/>
- Satiadji, & Bambang. (2010). *Diusulkan Ada Pemotongan Pajak*. Ortax.Org.
- Siregar, S. V., Debora, S., & Sirait, Y. (2012). *HUBUNGAN ANTARA BIAYA MODAL EKUITAS DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN MODAL INTELEKTUAL PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA Shanty Debora Yutriny Sirait HUBUNGAN ANTARA BIAYA MODAL EKUITAS DENGAN TINGKAT*

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN MODAL INTELEKTUAL PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA.

- Sugianto, D. (2019, July 5). Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. *Finance.Detik.Com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Suharto, Edi, “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, disampaikan pada workshop tentang Corporate Social Responsibility (CSR), Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung, 29 November 2006.
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Surbakti, T. A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Tanudjaja, B. B., Desain, J., Visual, K., Seni, F., Desain, D., Kristen, U., & Surabaya, P. (2006). *PERKEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA*. <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV>
- Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal 2007, <https://pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UU%20No%2025%20Tahun%202007%20Ttg%20PM.pdf>
- Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas 2007, <http://jdih.kemendag.go.id/id/news/2009/05/22/undang-undang-republik-indonesia-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas>
- Wei-Chuan Kao, chih-Hsien Liao; Tax Avoidance and Tax Disclosure in Corporate Social Responsibility Reports in the United Kingdom. *Journal of International accounting Research* 1 September 2021; 20 (3): 59-80. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2020-036>
- Wibisono, Yusuf, 2007, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), PT Gramedia, Jakarta.

LAMPIRAN

A. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja Tbk
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
5	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk
6	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
7	CAKK	Cahayaputra Asa Keramik Tbk
8	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk
9	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
10	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
11	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
12	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk
13	INCI	Intan Wijaya International Tbk
14	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk
15	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
16	SRSN	Indo Acitama Tbk
17	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
18	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk
19	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
20	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
21	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
22	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk
23	TALF	Tunas Alfin Tbk
24	TRST	Trias Sentosa Tbk
25	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
26	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
27	IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk
28	SINI	Singaraja Putra Tbk
29	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
30	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
31	SPMA	Suparma Tbk
32	AUTO	Astra Otoparts Tbk
33	INDS	Indospring Tbk
34	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

35	STAR	Star Petrochem Tbk
36	UCID	Uni Charm Indonesia Tbk
37	CCSI	Communication Cable Systems Indonesia Tbk
38	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
39	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk
40	ADES	Akasha Wira International Tbk
41	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
42	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
43	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
44	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
45	DLTA	Delta Djakarta Tbk
46	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
47	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
48	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
49	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
50	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
51	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
52	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
53	MYOR	Mayora Indah Tbk
54	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
55	SKBM	Sekar Bumi Tbk
56	SKLT	Sekar Laut Tbk
57	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
58	GGRM	Gudang Garam Tbk
59	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
60	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
61	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
62	KBLF	Kalbe Farma Tbk
63	MERK	Merck Indonesia Tbk
64	PYFA	Pyridam Farma Tbk
65	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
66	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
67	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
68	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
69	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk

B. Tabulasi Data

No	Kode	Tahun	CETR (X1)	COE (X2)	CSR (Y)
1	INTP	2019	0,0335	0,0250	0,4396
		2020	0,1449	0,0174	0,4633
		2021	0,1845	0,0197	0,4879
		2022	0,1443	0,0187	0,4966
2	SMBR	2019	0,0031	- 0,0751	0,5245
		2020	0,0100	- 0,0642	0,5236
		2021	0,0091	- 0,0292	0,5148
		2022	0,0046	- 0,0464	0,525
3	SMCB	2019	0,7600	0,0162	0,4815
		2020	0,0868	0,0102	0,4981
		2021	0,2439	0,0154	0,4983
		2022	0,2352	0,0130	0,5094
4	SMGR	2019	0,1930	0,0127	0,4571
		2020	0,3426	0,0074	0,4936
		2021	0,3548	0,0137	0,513
		2022	0,3140	0,0107	0,5394
5	WTON	2019	0,8972	- 0,0087	0,4783
		2020	0,8935	- 0,0101	0,477
		2021	0,2927	0,0033	0,4795
		2022	0,1938	- 0,0032	0,4969
6	ARNA	2019	0,2280	0,0265	0,4177
		2020	0,1391	0,0186	0,4323
		2021	0,1891	0,0204	0,4505
		2022	0,2197	0,0197	0,4779
7	CAKK	2019	1,4007	0,0619	0,4454
		2020	0,6699	0,0475	0,4684
		2021	0,0757	0,0378	0,48
		2022	0,3976	0,0427	0,4912
8	MARK	2019	0,3467	0,0087	0,4591
		2020	0,1381	0,0041	0,4703
		2021	0,1974	0,0117	0,4863
		2022	0,3491	0,0081	0,4813
9	MLIA	2019	0,8748	0,0601	0,4459
		2020	0,3428	0,0460	0,4223
		2021	0,0667	0,0369	0,4435

		2022	0,2652	0,0416	0,456
10	ISSP	2019	0,3271	- 0,0010	0,4492
		2020	0,1276	- 0,0038	0,4597
		2021	0,0725	0,0070	0,4705
		2022	0,2680	0,0018	0,5155
11	AGII	2019	0,1594	0,0524	0,4123
		2020	0,1905	0,0397	0,4191
		2021	0,0682	0,0331	0,4348
		2022	0,2844	0,0366	0,4714
12	BUDI	2019	0,1841	0,0410	0,4557
		2020	0,0657	0,0305	0,4712
		2021	0,1130	0,0276	0,4793
		2022	0,1844	0,0292	0,4941
13	INCI	2019	0,1749	0,0226	0,4306
		2020	0,1539	0,0155	0,4554
		2021	0,8545	0,0186	0,4843
		2022	0,1163	0,0172	0,5135
14	MOLI	2019	0,3419	0,0530	0,4363
		2020	0,2460	0,0403	0,4663
		2021	0,4965	0,0334	0,4818
		2022	0,7528	0,0370	0,4983
15	SAMF	2019	0,2858	- 0,0308	0,503
		2020	0,1038	- 0,0281	0,5164
		2021	0,3168	- 0,0075	0,5143
		2022	0,3516	- 0,0176	0,5304
16	SRSN	2019	0,3264	0,0482	0,4601
		2020	0,1343	0,0363	0,4741
		2021	0,3711	0,0311	0,4839
		2022	0,2429	0,0339	0,489
17	AKPI	2019	0,4282	0,0026	0,4853
		2020	0,2347	- 0,0009	0,5062
		2021	0,2489	0,0088	0,511
		2022	0,2666	0,0041	0,4893
18	ESIP	2019	0,1980	0,0448	0,4826
		2020	0,1916	0,0335	0,4972
		2021	0,2083	0,0294	0,5107
		2022	0,0752	0,0316	0,5363
19	IGAR	2019	0,2606	0,0310	0,4531
		2020	0,2271	0,0223	0,4902

		2021	0,2097	0,0227	0,4967
		2022	0,3797	0,0226	0,5025
20	IMPC	2019	0,3542	0,0521	0,4385
		2020	0,2313	0,0395	0,47
		2021	0,2477	0,0330	0,4608
		2022	0,2216	0,0364	0,4864
21	PBID	2019	0,4013	0,0350	0,4476
		2020	0,1773	0,0256	0,4551
		2021	0,2376	0,0246	0,4676
		2022	0,3371	0,0253	0,5048
22	SMKL	2019	0,6433	0,0488	0,4475
		2020	0,1150	0,0368	0,4705
		2021	0,1108	0,0314	0,4829
		2022	0,4489	0,0343	0,4729
23	TALF	2019	0,5128	0,0522	0,4272
		2020	0,2330	0,0396	0,4344
		2021	0,3360	0,0330	0,4374
		2022	0,2366	0,0364	0,4391
24	TRST	2019	1,0515	0,0543	0,4809
		2020	0,2039	0,0413	0,4878
		2021	0,1187	0,0341	0,4971
		2022	0,3446	0,0378	0,5033
25	CPIN	2019	0,4230	0,0426	0,4327
		2020	0,2446	0,0317	0,4379
		2021	0,2385	0,0283	0,4494
		2022	0,3749	0,0302	0,4728
26	JPFA	2019	0,4899	0,0117	0,4924
		2020	0,1997	0,0065	0,5034
		2021	0,2852	0,0132	0,5248
		2022	0,3925	0,0101	0,5686
27	IFII	2019	0,4307	0,0407	0,4483
		2020	0,1794	0,0302	0,4565
		2021	0,1572	0,0274	0,4711
		2022	0,0576	0,0289	0,4735
28	SINI	2019	1,2102	- 0,0446	0,5288
		2020	0,5968	- 0,0394	0,5277
		2021	0,2740	- 0,0143	0,5234
		2022	0,3557	- 0,0266	0,5337
29	ALDO	2019	0,1850	0,0431	0,4346

		2020	0,2973	0,0321	0,4596
		2021	0,2305	0,0286	0,4962
		2022	0,4947	0,0305	0,5219
30	FASW	2019	0,4336	0,0488	0,459
		2020	0,2141	0,0368	0,4576
		2021	0,2512	0,0314	0,487
		2022	0,8266	0,0343	0,5015
31	SPMA	2019	0,0922	0,0214	0,4411
		2020	0,1121	0,0144	0,4659
		2021	0,1214	0,0180	0,5102
		2022	0,1237	0,0164	0,5362
32	AUTO	2019	0,1997	0,0240	0,5065
		2020	1,2464	0,0166	0,5203
		2021	0,2431	0,0193	0,5153
		2022	0,1557	0,0181	0,5206
33	INDS	2019	0,2854	0,0300	0,5077
		2020	0,2058	0,0215	0,5192
		2021	0,2529	0,0222	0,5209
		2022	0,1895	0,0220	0,4987
34	SMSM	2019	0,2455	0,0350	0,4754
		2020	0,2014	0,0256	0,4839
		2021	0,1821	0,0246	0,4978
		2022	0,2200	0,0253	0,5045
35	STAR	2019	0,8275	0,0570	0,4753
		2020	0,0017	0,0435	0,4807
		2021	0,0070	0,0354	0,4907
		2022	0,0497	0,0395	0,4926
36	UCID	2019	0,5656	0,0287	0,4892
		2020	0,3694	0,0204	0,495
		2021	0,3491	0,0216	0,493
		2022	0,6468	0,0211	0,5009
37	CCSI	2019	0,3130	0,0375	0,4711
		2020	0,3462	0,0275	0,4767
		2021	0,2333	0,0258	0,4989
		2022	0,2229	0,0268	0,5036
38	SCCO	2019	0,2276	0,0438	0,4818
		2020	0,2820	0,0327	0,4932
		2021	0,1860	0,0289	0,4993
		2022	0,2109	0,0310	0,5189

39	SLIS	2019	0,3392	0,1223	0,4562
		2020	0,1891	0,0967	0,4691
		2021	2,8185	0,0673	0,5098
		2022	0,2196	0,0821	0,5054
40	ADES	2019	0,1442	0,0156	0,4537
		2020	0,1137	0,0097	0,4712
		2021	0,1713	0,0151	0,4846
		2022	0,1767	0,0126	0,4991
41	CAMP	2019	0,2792	0,0141	0,4835
		2020	0,3853	0,0085	0,4962
		2021	0,1827	0,0144	0,4999
		2022	0,2099	0,0116	0,5045
42	CEKA	2019	0,1790	0,0304	0,443
		2020	0,2940	0,0218	0,4536
		2021	0,2840	0,0224	0,4769
		2022	0,2419	0,0223	0,4954
43	CLEO	2019	0,1564	0,0649	0,4496
		2020	0,1709	0,0499	0,4792
		2021	0,1730	0,0392	0,4886
		2022	0,1992	0,0447	0,4966
44	COCO	2019	0,2435	0,0621	0,4153
		2020	0,5100	0,0476	0,4288
		2021	0,1455	0,0378	0,4346
		2022	0,3550	0,0429	0,4571
45	DLTA	2019	2,1645	0,0327	0,4484
		2020	3,4559	0,0237	0,4892
		2021	2,6191	0,0235	0,496
		2022	2,7546	0,0237	0,5067
46	DMND	2019	0,2608	0,0642	0,4824
		2020	0,2136	0,0494	0,4744
		2021	0,1754	0,0389	0,4667
		2022	0,2892	0,0443	0,4802
47	GOOD	2019	0,2180	0,0452	0,4847
		2020	0,3672	0,0339	0,4948
		2021	0,2479	0,0296	0,5113
		2022	0,2269	0,0319	0,5154
48	HOKI	2019	0,3561	0,0454	0,4681
		2020	0,3924	0,0340	0,4862
		2021	0,6324	0,0297	0,5007

		2022	15,9311	0,0320	0,5594
49	ICBP	2019	0,2173	0,0593	0,4625
		2020	0,1692	0,0453	0,485
		2021	0,2836	0,0365	0,4937
		2022	0,2965	0,0411	0,5071
50	INDF	2019	0,2699	0,0507	0,4323
		2020	0,2241	0,0383	0,4472
		2021	0,2475	0,0323	0,4936
		2022	0,3065	0,0354	0,4976
51	KEJU	2019	0,2730	0,0466	0,437
		2020	0,2613	0,0350	0,4686
		2021	0,1800	0,0303	0,487
		2022	0,3562	0,0328	0,4917
52	MLBI	2019	0,2809	0,0402	0,5166
		2020	0,6222	0,0298	0,5245
		2021	0,1990	0,0272	0,5125
		2022	0,2595	0,0286	0,5175
53	MYOR	2019	0,2024	0,0579	0,424
		2020	0,2291	0,0442	0,4329
		2021	0,2626	0,0358	0,4447
		2022	0,1525	0,0402	0,4645
54	ROTI	2019	0,1590	0,0470	0,4381
		2020	0,2019	0,0353	0,4699
		2021	0,1350	0,0305	0,4665
		2022	0,1433	0,0330	0,4875
55	SKBM	2019	2,2950	0,1104	0,4518
		2020	0,8536	0,0870	0,4722
		2021	0,3266	0,0615	0,4819
		2022	0,0620	0,0743	0,4842
56	SKLT	2019	0,2580	0,0579	0,4645
		2020	0,1666	0,0442	0,4898
		2021	0,1069	0,0358	0,5014
		2022	0,2902	0,0401	0,4936
57	ULTJ	2019	0,2028	0,0624	0,4272
		2020	0,2259	0,0479	0,4348
		2021	0,2151	0,0380	0,4471
		2022	0,3319	0,0431	0,4556
58	GGRM	2019	0,2212	0,0320	0,4277
		2020	0,2330	0,0231	0,4497

		2021	0,1680	0,0232	0,4764
		2022	0,3234	0,0233	0,4567
59	HMSP	2019	0,2536	0,0391	0,4234
		2020	0,2641	0,0289	0,4392
		2021	0,6912	0,0266	0,4756
		2022	0,2308	0,0279	0,4563
60	WIIM	2019	0,3493	- 0,0408	0,497
		2020	0,0656	- 0,0362	0,4705
		2021	0,2788	- 0,0124	0,4907
		2022	0,1254	- 0,0241	0,4879
61	DVLA	2019	0,2652	0,0589	0,427
		2020	0,2707	0,0450	0,4291
		2021	0,3940	0,0363	0,4465
		2022	0,3064	0,0408	0,4681
62	KLBF	2019	0,2467	0,0442	0,4701
		2020	0,1661	0,0330	0,4809
		2021	0,2335	0,0291	0,4794
		2022	0,2613	0,0312	0,4905
63	MERK	2019	2,9240	0,0176	0,4585
		2020	0,0939	0,0113	0,4496
		2021	0,1427	0,0161	0,4716
		2022	0,3128	0,0139	0,4766
64	PYFA	2019	0,2506	0,0246	0,4876
		2020	0,1452	0,0170	0,4936
		2021	0,6447	0,0195	0,498
		2022	0,0181	0,0184	0,5017
65	SIDO	2019	0,2145	0,0569	0,4244
		2020	0,2037	0,0434	0,4331
		2021	0,1956	0,0353	0,4668
		2022	0,2369	0,0395	0,4674
66	TSPC	2019	0,7636	0,0240	0,4665
		2020	0,4895	0,0166	0,4447
		2021	0,5995	0,0193	0,4846
		2022	0,4877	0,0181	0,4931
67	UNVR	2019	0,3151	0,0477	0,4692
		2020	0,1839	0,0359	0,4818
		2021	0,2465	0,0309	0,4969
		2022	0,2516	0,0335	0,5061
68	WOOD	2019	0,3800	0,0198	0,4345

		2020	0,1546	0,0131	0,4548
		2021	0,1873	0,0172	0,4788
		2022	0,9398	0,0153	0,4621
69	HRTA	2019	0,4545	0,0728	0,4594
		2020	0,2459	0,0564	0,4769
		2021	0,1733	0,0431	0,4869
		2022	0,2553	0,0499	0,4998

C. Indeks Standar GRI

	Keterangan
102-1	Nama organisasi
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa
102-3	Lokasi kantor pusat
102-4	Lokasi operasi
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum
102-6	Pasar yang dilayani
102-7	Skala organisasi
102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya
102-9	Rantai pasokan
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan
102-12	Inisiatif Eksternal
102-13	Keanggotaan asosiasi
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika
102-18	Struktur tata kelola
102-19	Mendelegasikan wewenang
102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya
102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi
102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi
102-25	Konflik kepentingan

102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi
102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-30	Keefektifan proses manajemen risiko
102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis
102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis
102-35	Kebijakan remunerasi
102-36	Proses untuk menentukan remunerasi
102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi
102-38	Rasio kompensasi total tahunan
102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
102-41	Perjanjian perundingan kolektif
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik
102-47	Daftar Topik Material
102-48	Penyajian kembali informasi
102-49	Perubahan dalam pelaporan
102-50	Periode pelaporan
102-51	Tanggal laporan terbaru
102-52	Siklus pelaporan
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI
102-55	Indeks isi GRI
102-56	Assurance oleh pihak eksternal
103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim

201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
207-1	Pendekatan terhadap pajak
207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
207-4	Laporan per negara
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3	Material input dari daur ulang yang digunakan
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
302-3	Intensitas energi
302-4	Pengurangan konsumsi energi
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3	Pengambilan air
303-4	Pembuangan air
303-5	Konsumsi air
304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi

304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4	Intensitas emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
305-7	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya
306-1	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan
306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
306-3	Tumpahan yang signifikan
306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti melahirkan
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
403-3	Layanan kesehatan kerja
403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
403-5	Pelatihan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja
403-10	Penyakit Akibat Kerja
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan

404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
415-1	Kontribusi politik
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

D. Skor CSRD

No	Kode	Tahun	Total Indeks	CSRD	No	Kode	Tahun	Total Indeks	CSRD
1	INTP	2019	65	0,4396	36	UCID	2019	72	0,4892
		2020	69	0,4633			2020	73	0,495
		2021	72	0,4879			2021	73	0,493
		2022	73	0,4966			2022	74	0,5009
2	SMBR	2019	78	0,5245	37	CCSI	2019	70	0,4711
		2020	77	0,5236			2020	71	0,4767
		2021	76	0,5148			2021	74	0,4989
		2022	78	0,525			2022	75	0,5036
3	SMCB	2019	71	0,4815	38	SCCO	2019	71	0,4818
		2020	74	0,4981			2020	73	0,4932
		2021	74	0,4983			2021	74	0,4993
		2022	75	0,5094			2022	77	0,5189
4	SMGR	2019	68	0,4571	39	SLIS	2019	68	0,4562
		2020	73	0,4936			2020	69	0,4691
		2021	76	0,513			2021	75	0,5098
		2022	80	0,5394			2022	75	0,5054
5	WTON	2019	71	0,4783	40	ADES	2019	67	0,4537
		2020	71	0,477			2020	70	0,4712
		2021	71	0,4795			2021	72	0,4846
		2022	74	0,4969			2022	74	0,4991
6	ARNA	2019	62	0,4177	41	CAMP	2019	72	0,4835
		2020	64	0,4323			2020	73	0,4962
		2021	67	0,4505			2021	74	0,4999
		2022	71	0,4779			2022	75	0,5045
7	CAKK	2019	66	0,4454	42	CEKA	2019	66	0,443
		2020	69	0,4684			2020	67	0,4536
		2021	71	0,48			2021	71	0,4769
		2022	73	0,4912			2022	73	0,4954
8	MARK	2019	68	0,4591	43	CLEO	2019	67	0,4496

		2020	70	0,4703			2020	71	0,4792
		2021	72	0,4863			2021	72	0,4886
		2022	71	0,4813			2022	73	0,4966
9	MLIA	2019	66	0,4459	44	COCO	2019	61	0,4153
		2020	63	0,4223			2020	63	0,4288
		2021	66	0,4435			2021	64	0,4346
		2022	67	0,456			2022	68	0,4571
10	ISSP	2019	66	0,4492	45	DLTA	2019	66	0,4484
		2020	68	0,4597			2020	72	0,4892
		2021	70	0,4705			2021	73	0,496
		2022	76	0,5155			2022	75	0,5067
11	AGII	2019	61	0,4123	46	DMND	2019	71	0,4824
		2020	62	0,4191			2020	70	0,4744
		2021	64	0,4348			2021	69	0,4667
		2022	70	0,4714			2022	71	0,4802
12	BUDI	2019	67	0,4557	47	GOOD	2019	72	0,4847
		2020	70	0,4712			2020	73	0,4948
		2021	71	0,4793			2021	76	0,5113
		2022	73	0,4941			2022	76	0,5154
13	INCI	2019	64	0,4306	48	HOKI	2019	69	0,4681
		2020	67	0,4554			2020	72	0,4862
		2021	72	0,4843			2021	74	0,5007
		2022	76	0,5135			2022	83	0,5594
14	MOLI	2019	65	0,4363	49	ICBP	2019	68	0,4625
		2020	69	0,4663			2020	72	0,485
		2021	71	0,4818			2021	73	0,4937
		2022	74	0,4983			2022	75	0,5071
15	SAMF	2019	74	0,503	50	INDF	2019	64	0,4323
		2020	76	0,5164			2020	66	0,4472
		2021	76	0,5143			2021	73	0,4936
		2022	78	0,5304			2022	74	0,4976
16	SRSN	2019	68	0,4601	51	KEJU	2019	65	0,437
		2020	70	0,4741			2020	69	0,4686
		2021	72	0,4839			2021	72	0,487
		2022	72	0,489			2022	73	0,4917
17	AKPI	2019	72	0,4853	52	MLBI	2019	76	0,5166
		2020	75	0,5062			2020	78	0,5245
		2021	76	0,511			2021	76	0,5125
		2022	72	0,4893			2022	77	0,5175

18	ESIP	2019	71	0,4826	53	MYOR	2019	63	0,424
		2020	74	0,4972			2020	64	0,4329
		2021	76	0,5107			2021	66	0,4447
		2022	79	0,5363			2022	69	0,4645
19	IGAR	2019	67	0,4531	54	ROTI	2019	65	0,4381
		2020	73	0,4902			2020	70	0,4699
		2021	74	0,4967			2021	69	0,4665
		2022	74	0,5025			2022	72	0,4875
20	IMPC	2019	65	0,4385	55	SKBM	2019	67	0,4518
		2020	70	0,47			2020	70	0,4722
		2021	68	0,4608			2021	71	0,4819
		2022	72	0,4864			2022	72	0,4842
21	PBID	2019	66	0,4476	56	SKLT	2019	69	0,4645
		2020	67	0,4551			2020	72	0,4898
		2021	69	0,4676			2021	74	0,5014
		2022	75	0,5048			2022	73	0,4936
22	SMKL	2019	66	0,4475	57	ULTJ	2019	63	0,4272
		2020	70	0,4705			2020	64	0,4348
		2021	71	0,4829			2021	66	0,4471
		2022	70	0,4729			2022	67	0,4556
23	TALF	2019	63	0,4272	58	GGRM	2019	63	0,4277
		2020	64	0,4344			2020	67	0,4497
		2021	65	0,4374			2021	71	0,4764
		2022	65	0,4391			2022	68	0,4567
24	TRST	2019	71	0,4809	59	HMSP	2019	63	0,4234
		2020	72	0,4878			2020	65	0,4392
		2021	74	0,4971			2021	70	0,4756
		2022	74	0,5033			2022	68	0,4563
25	CPIN	2019	64	0,4327	60	WIIM	2019	74	0,497
		2020	65	0,4379			2020	70	0,4705
		2021	67	0,4494			2021	73	0,4907
		2022	70	0,4728			2022	72	0,4879
26	JPFA	2019	73	0,4924	61	DVLA	2019	63	0,427
		2020	75	0,5034			2020	64	0,4291
		2021	78	0,5248			2021	66	0,4465
		2022	84	0,5686			2022	69	0,4681
27	IFII	2019	66	0,4483	62	KLBF	2019	70	0,4701
		2020	68	0,4565			2020	71	0,4809
		2021	70	0,4711			2021	71	0,4794

		2022	70	0,4735			2022	73	0,4905
28	SINI	2019	78	0,5288	63	MERK	2019	68	0,4585
		2020	78	0,5277			2020	67	0,4496
		2021	77	0,5234			2021	70	0,4716
		2022	79	0,5337			2022	71	0,4766
29	ALDO	2019	64	0,4346	64	PYFA	2019	72	0,4876
		2020	68	0,4596			2020	73	0,4936
		2021	73	0,4962			2021	74	0,498
		2022	77	0,5219			2022	74	0,5017
30	FASW	2019	68	0,459	65	SIDO	2019	63	0,4244
		2020	68	0,4576			2020	64	0,4331
		2021	72	0,487			2021	69	0,4668
		2022	74	0,5015			2022	69	0,4674
31	SPMA	2019	65	0,4411	66	TSPC	2019	69	0,4665
		2020	69	0,4659			2020	66	0,4447
		2021	76	0,5102			2021	72	0,4846
		2022	79	0,5362			2022	73	0,4931
32	AUTO	2019	75	0,5065	67	UNVR	2019	69	0,4692
		2020	77	0,5203			2020	71	0,4818
		2021	76	0,5153			2021	74	0,4969
		2022	77	0,5206			2022	75	0,5061
33	INDS	2019	75	0,5077	68	WOOD	2019	64	0,4345
		2020	77	0,5192			2020	67	0,4548
		2021	77	0,5209			2021	71	0,4788
		2022	74	0,4987			2022	68	0,4621
34	SMSM	2019	70	0,4754	69	HRTA	2019	68	0,4594
		2020	72	0,4839			2020	71	0,4769
		2021	74	0,4978			2021	72	0,4869
		2022	75	0,5045			2022	74	0,4998
35	STAR	2019	70	0,4753					
		2020	71	0,4807					
		2021	73	0,4907					
		2022	73	0,4926					

E. Lampiran Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	276	,0017	15,9311	,407318	1,0351680
COE	276	-,0751	,1223	,028290	,0235462
CSR	276	,4123	,5686	,478287	,0286304
Valid N (listwise)	276				

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

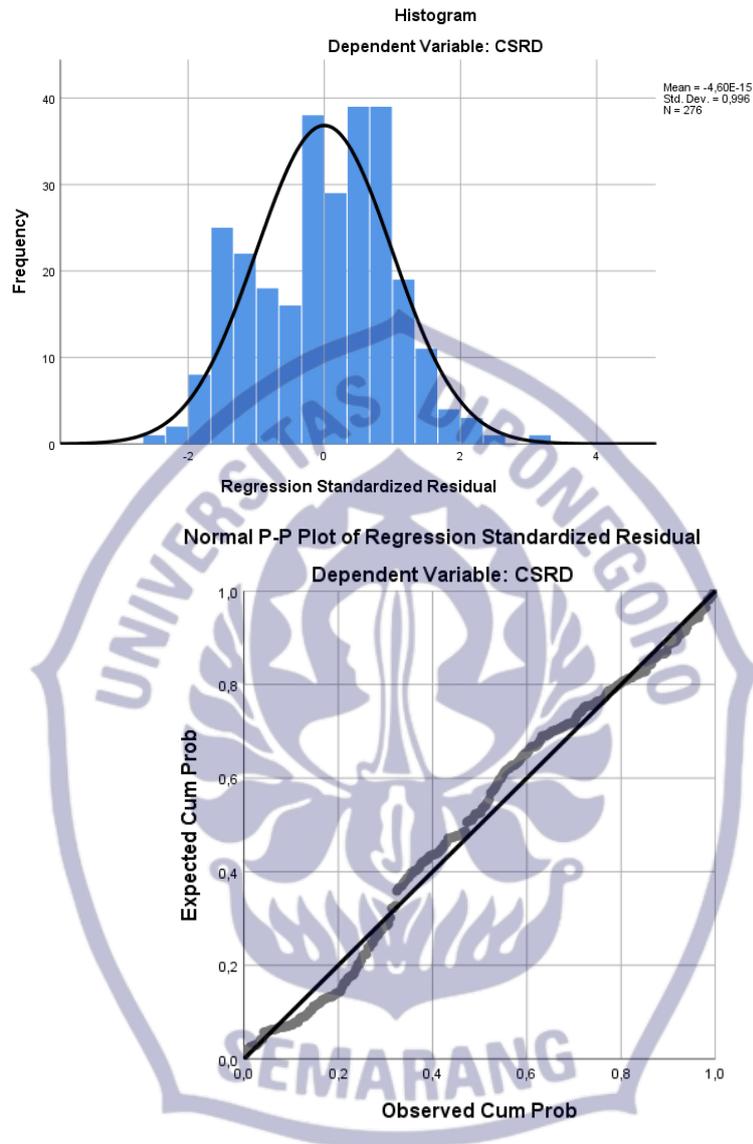
		Unstandardized Residual
N		276
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02533244
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,063
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,010 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,207 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,196
	Upper Bound	,217

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.



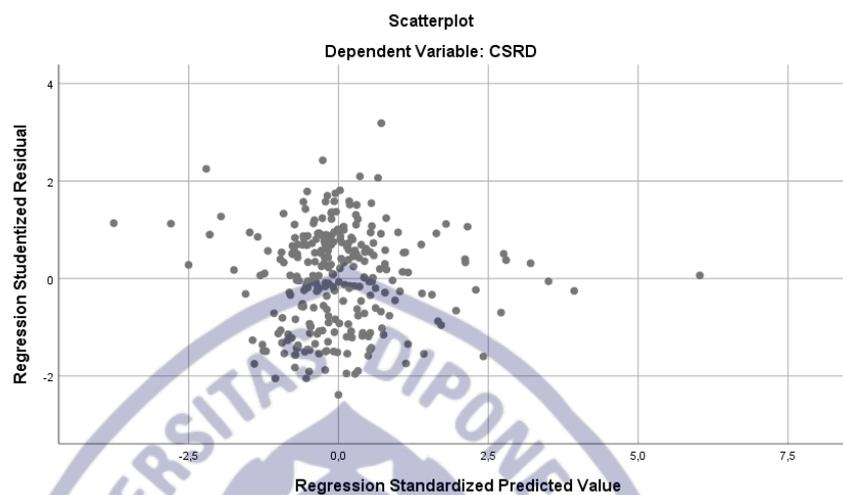
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,491	,002		200,553	,000		
	CETR	,005	,001	,192	3,579	,000	,997	1,003
	COE	-,528	,065	-,434	-8,103	,000	,997	1,003

a. Dependent Variable: CSRD

3. Uji Heterokedastisitas



4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,466 ^a	,217	,211	,0254251	1,079

a. Predictors: (Constant), COE, CETR

b. Dependent Variable: CSRD

G. Hasil analisis Linear Berganda

1. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,049	2	,024	37,855	,000 ^b
	Residual	,176	273	,001		
	Total	,225	275			

a. Dependent Variable: CSRD

b. Predictors: (Constant), COE, CETR

2. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,491	,002		200,553	,000
	CETR	,005	,001	,192	3,579	,000
	COE	-,528	,065	-,434	-8,103	,000

a. Dependent Variable: CSRD

